SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal;
b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Bandung, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan standar pelayanan minimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

10. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2026-2030.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENERAPAN SPM
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
    a. pendidikan anak usia dini;
    b. pendidikan dasar;
    c. pendidikan kesetaraan;
    d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

g. pelayanan kesehatan balita;
h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a. pengumpulan data;
   b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
   c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
   d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(2) Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

(2) Dalam penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
   a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
   b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penerapan SPM Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RAD-SPM

Pasal 8

(1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 9

(1) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra PD.
(2) Target dan capaian jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.

Pasal 10

(1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
    a. pendahuluan;
    b. kondisi dan permasalahan pemenuhan SPM;
    c. strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
    d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM;dan
    e. kesimpulan dan saran.
(2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pelaporan dilakukan terhadap target capaian penerapan SPM.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM meliputi:
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026-2030

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 (enam) urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pembangunan dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis pemenuhan standar.

Dalam mendukung implementasi penerapan standar pelayanan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 menjadi. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Salah satunya dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mengkoordinasikan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dinilai perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal dalam mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi Daerah tersebut kemudian akan diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan di daerah agar dapat menjadi prioritas pembangunan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bandung ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ditargetkan baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program,

kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

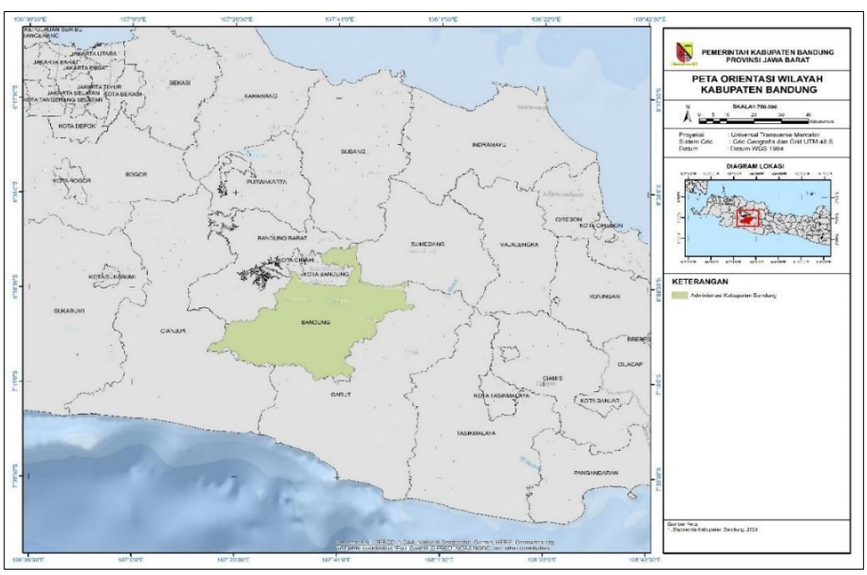
1.3 Kondisi Umum Wilayah

1.3.1 Kondisi Geografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, secara geografis, Kabupaten Bandung terletak di antara 6° 41’ 00” dan 7° 19’ 00” Lintang Selatan dan antara 107° 22’ 00” dan 108° 50’ 00” Bujur Timur dan berada di wilayah dataran tinggi dengan luas 174.084,34 Ha . Adapun Ibukota Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Soreang. Secara administrasi, Berikut merupakan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung:

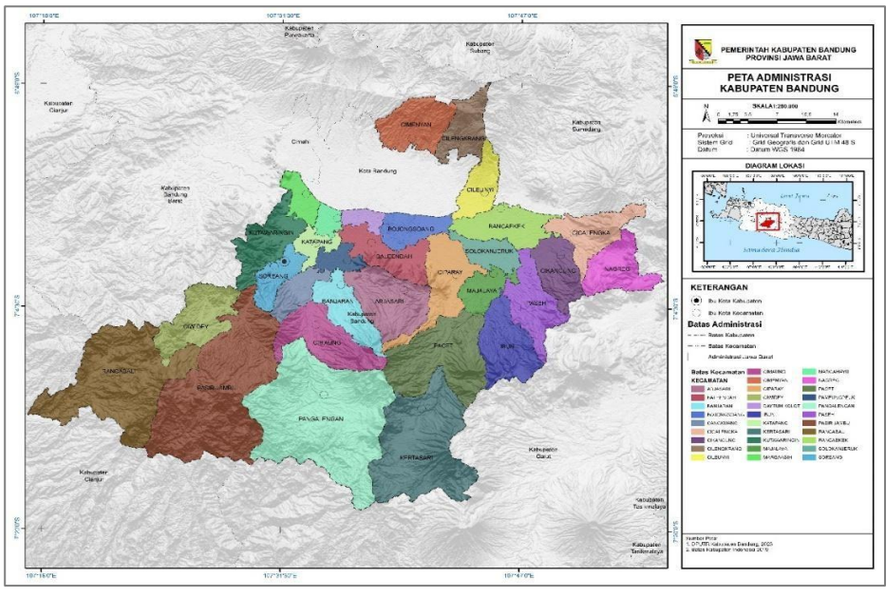
Sebelah Utara	:	Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Subang , dan Kabupaten Sumedang
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
Sebelah Barat	:	Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

Peta orientasi wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027



Gambar 1.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan. Adapun kecamatan serta luas wilayah administratif masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/ Kelurahan
		Ha	%	
1	Kecamatan Pangalengan	21.656,39	12,44	13
2	Kecamatan Pasirjambu	19.807,79	11,38	10
3	Kecamatan Rancabali	15.286,64	8,78	5
4	Kecamatan Kertasari	13.654,39	7,84	8
5	Kecamatan Pacet	9.482,01	5,45	13
6	Kecamatan Arjasari	6.277,55	3,61	11
7	Kecamatan Cimaung	5.955,56	3,42	10
8	Kecamatan Ciwidey	5.519,18	3,17	7
9	Kecamatan Ibun	5.477,22	3,15	12
10	Kecamatan Ciparay	5.366,72	3,08	14
11	Kecamatan Paseh	4.789,21	2,75	12
12	Kecamatan Cimenyan	4.758,98	2,73	9
13	Kecamatan Kutawaringin	4.705,50	2,70	11
14	Kecamatan Rancaekek	4.486,63	2,58	14
15	Kecamatan Cicalengka	4.351,07	2,50	12
16	Kecamatan Nagreg	4.282,97	2,46	8
17	Kecamatan Baleendah	4.182,97	2,40	8
18	Kecamatan Banjaran	3.903,25	2,24	11
19	Kecamatan Cikancung	3.872,63	2,22	9
20	Kecamatan Cilengkrang	3.525,17	2,02	6
21	Kecamatan Cileunyi	3.063,24	1,76	6
22	Kecamatan Bojongsoang	2.822,38	1,62	6
23	Kecamatan Soreang	2.537,04	1,46	10
24	Kecamatan Solokanjeruk	2.435,27	1,40	7

No	Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/ Kelurahan
		Ha	%	
25	Kecamatan Majalaya	2.431,45	1,40	11
26	Kecamatan Cangkuang	2.375,09	1,36	7
27	Kecamatan Margaasih	1.832,39	1,05	6
28	Kecamatan Katapang	1.561,94	0,90	7
29	Kecamatan Pameungpeuk	1.514,15	0,87	6
30	Kecamatan Dayeuhkolot	1.115,30	0,64	6
31	Kecamatan Margahayu	1.054,26	0,61	5
Total		174.084,34	100,00	280

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung yang dikelilingi deretan pegunungan, antara lain meliputi:

a. Di bagian utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta;
b. Di bagian selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut;
c. Dibagian bagian barat terdapat sederetan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung- punggung tidak teratur; dan
d. Di bagian timur terdapat Gunung Krenceng dan Gunung Mandalawangi

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Topografi wilayah merupakan pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan, dan ketinggian secara umum pada satuan morfologi.

Sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%). Sebagian besar kawasan perkotaan seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang terletak di topografi

ini. Kawasan dengan topografi <700 mdpl ini berpotensi mengalami banjir yang dilanda pada setiap musim hujan dikarenakan aliran sungai yang ada di seluruh Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta dangkalnya sungai.

Adapun Kecamatan yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian wilayah Kabupaten Bandung bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang.

1.3.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025, dengan total penduduk pada tahun 2025 mencapai 3.873.653 jiwa. Beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2025 adalah Baleendah (280.359 jiwa), Rancaekek (192.921 jiwa), dan Ciparay (187.055 jiwa). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk lebih sedikit antara lain Rancabali (54.584 jiwa), Cilengkrang (55.821 jiwa), dan Nagreg (63.236 jiwa). Beberapa kecamatan seperti Pameungpeuk, Nagreg, dan Ciwidey masih mengalami pertumbuhan positif cukup tinggi, sedangkan wilayah seperti Cileunyi, CImenyan, Cilengkrang, dan Bojongsoang mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan pertumbuhan penduduk antar wilayah, yang dapat dipengaruhi oleh faktor migrasi, urbanisasi, serta daya tarik ekonomi, dan infrastruktur tiap kecamatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung (jiwa)					Laju Pertumbuhan (2020-2025)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Baleendah	266.930	270.617	274.244	277.761	280.359	0,94%
2	Rancaekek	186.696	188.204	189.653	190.998	192.921	1,01%
3	Ciparay	174.103	175.914	177.677	179.350	187.055	4,30%
4	Cileunyi	188.392	190.566	192.693	194.727	184.397	-5,30%
5	Majalaya	160.823	161.289	161.696	162.006	171.781	6,03%
6	Pangalengan	155.136	156.242	157.296	158.263	169.257	6,95%
7	Margaasih	149.454	150.612	151.722	152.748	155.740	1,96%
8	Paseh	137.365	138.761	140.119	141.405	148.736	5,18%

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung (jiwa)					Laju Pertumbuhan (2020-2025)
		2021	2022	2023	2024	2025	
9	Banjaran	133.488	135.023	136.524	137.959	143.325	3,89%
10	Katapang	132.180	134.182	136.164	138.092	140.044	1,41%
11	Cicalengka	122.991	124.026	125.022	125.951	132.543	5,23%
12	Pacet	116.017	117.164	118.278	119.331	132.162	10,75%
13	Soreang	117.456	118.458	119.422	120.323	124.049	3,10%
14	Margahayu	121.169	120.926	120.638	120.279	121.324	0,87%
15	Arjasari	106.673	107.937	109.176	110.362	118.761	7,61%
16	Cimenyan	115.193	116.010	116.789	117.502	113.982	-3,00%
17	Kutawaringin	103.403	104.528	105.625	106.670	113.933	6,81%
18	Bojongsoang	113.221	113.957	114.654	115.287	113.191	-1,82%
19	Cikancung	97.863	99.189	100.495	101.758	107.672	5,81%
20	Dayeuhkolot	106.639	106.266	105.855	105.381	106.900	1,44%
21	Pasirjambu	91.957	92.879	93.775	94.623	99.395	5,04%
22	Ibun	87.825	88.780	89.712	90.600	97.060	7,13%
23	Pameungpeuk	85.827	87.256	88.676	90.065	96.792	7,47%
24	Cimaung	87.092	88.264	89.418	90.532	96.258	6,32%
25	Solokanjeruk	87.361	88.081	88.774	89.419	94.128	5,27%
26	Ciwidey	87.486	88.683	89.863	91.003	93.925	3,21%
27	Cangkuang	80.987	82.463	83.935	85.382	87.831	2,87%
28	Kertasari	71.495	71.852	72.183	72.473	76.491	5,54%
29	Nagreg	59.141	59.979	60.807	61.609	63.236	2,64%
30	Cilengkrang	56.824	57.734	58.637	59.519	55.821	-6,21%
31	Rancabali	51.211	51.409	51.589	51.738	54.584	5,50%
Kabupaten Bandung		**3.652.398**	**3.687.251**	**3.721.111**	**3.753.116**	**3.873.653**	**1,57%**

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

Berdasarkan uraian tabel di atas, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2025 mencapai 3.873.653 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,57%. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tercatat penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 50,89% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.986.995 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49,11% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.904.670 jiwa. Informasi terkait jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin didukung oleh data Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2025

Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
32.04.05	Cileunyi	93.674	4,71	92.015	4,80	185.689	4,76
32.04.06	Cimenyan	58.218	2,93	56.460	2,94	114.678	2,94
32.04.07	Cilengkrang	28.453	1,43	27.736	1,45	56.189	1,44
32.04.08	Bojongsoang	57.451	2,89	56.615	2,95	114.066	2,92
32.04.09	Margahayu	61.083	3,07	60.559	3,16	121.642	3,12
32.04.10	Margaasih	79.486	4,00	77.311	4,03	156.797	4,02
32.04.11	Katapang	71.863	3,62	69.685	3,63	141.548	3,63
32.04.12	Dayeuhkolot	54.317	2,73	52.826	2,75	107.143	2,74
32.04.13	Banjaran	73.346	3,69	70.826	3,69	144.172	3,69
32.04.14	Pameungpeuk	49.666	2,50	48.077	2,51	97.743	2,50
32.04.15	Pangalengan	86.736	4,37	83.739	4,37	170.475	4,37
32.04.16	Arjasari	61.256	3,08	59.135	3,08	120.391	3,08
32.04.17	Cimaung	49.411	2,49	47.712	2,49	97.123	2,49
32.04.25	Cicalengka	67.716	3,41	65.761	3,43	133.477	3,42
32.04.26	Nagreg	32.712	1,65	31.142	1,62	63.854	1,64
32.04.27	Cikancung	55.823	2,81	53.066	2,77	108.889	2,79
32.04.28	Rancaekek	97.617	4,91	96.420	5,03	194.037	4,97
32.04.29	Ciparay	96.240	4,84	92.473	4,82	188.713	4,83
32.04.30	Pacet	69.309	3,49	64.639	3,37	133.948	3,43
32.04.31	Kertasari	39.262	1,98	37.644	1,96	76.906	1,97
32.04.32	Baleendah	143.517	7,22	139.433	7,27	282.950	7,25
32.04.33	Majalaya	88.763	4,47	84.326	4,40	173.089	4,43
32.04.34	Solokanjeruk	48.474	2,44	46.148	2,41	94.622	2,42
32.04.35	Paseh	77.504	3,90	72.957	3,80	150.461	3,85
32.04.36	Ibun	50.260	2,53	47.679	2,49	97.939	2,51
32.04.37	Soreang	63.297	3,19	61.464	3,21	124.761	3,20
32.04.38	Pasirjambu	51.092	2,57	48.855	2,55	99.947	2,56
32.04.39	Ciwidey	48.486	2,44	46.229	2,41	94.715	2,43
32.04.40	Rancabali	28.125	1,42	26.804	1,40	54.929	1,41
32.04.44	Cangkuang	45.249	2,28	43.664	2,28	88.913	2,28
32.04.46	Kutawaringin	58.589	2,95	56.275	2,93	114.864	2,94
Jumlah		1.986.995	50,89	1.917.675	49,11	3.904.670	100

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

1.3.3 Kondisi Perekonomian

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan aktivitas ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. LPE dihitung berdasarkan perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan menilai keberhasilan pembangunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung yang direpresentasikan melalui Produk Domestik

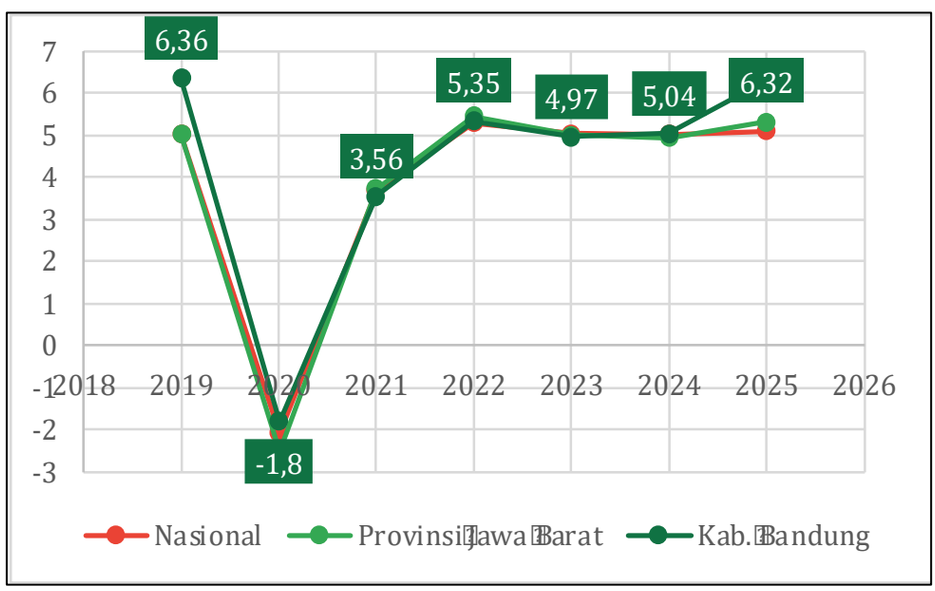
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan tren positif di tengah tantangan makroekonomi nasional dan provinsi. Berbeda dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, Kabupaten Bandung justru mencatatkan percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah tumbuh sebesar 5,04% pada tahun 2024, capaian LPE tahun 2025 meningkat menjadi 6,32%.

Tabel 1.4 Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

LPE	2023	2024	2025
Target (%)	5,40	4,9-5,4	4,90-5,25
Capaian (%)	4,97	5,04	6,32

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

Jika ditinjau lebih lanjut, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung sempat mengalami kontraksi pada tahun 2019 dengan penurunan sangat signifikan hingga -1,80%. Kondisi tersebut diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 dan berpengaruh secara nasional. Adapun ilustrasi tren pertumbuhan ekonomi secara nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung selama periode 2019 hingga 2025 disajikan dalam bentuk grafik berikut.

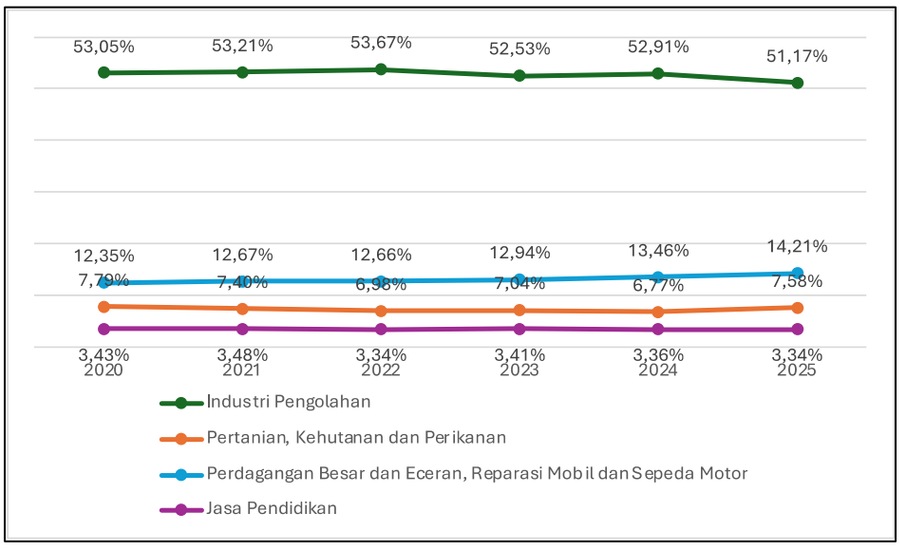


Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2025
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027

Kontraksi ekonomi secara nasional yang terjadi tahun 2020 turut dialami oleh Kabupaten Bandung dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tergolong sangat tajam. Meskipun demikian, pada

tahun-tahun berikutnya terlihat adanya pemulihan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2021 dan 2022, dengan pertumbuhan Kabupaten Bandung mencapai 3,56% dan 5,35%.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit fluktuasi pada 2023 (4,97%), tren pemulihan tetap berlanjut hingga 2024 dengan pertumbuhan sebesar 5,04%. Bahkan, pada tahun 2025 perekonomian daerah ini sangat melonjak dengan signifikan, karena laju pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 6,32%. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung mampu kembali ke jalur pertumbuhan positif pascapandemi, sejalan dengan tren regional dan nasional. Performa pada tahun tersebut juga jauh lebih unggul daripada nasional/Indonesia (5,11%), maupun juga provinsi Jawa Barat (5,32%). Hal ini mengindikasikan ketahanan struktur ekonomi daerah serta efektivitas intervensi kebijakan yang telah diterapkan selama periode pemulihan.

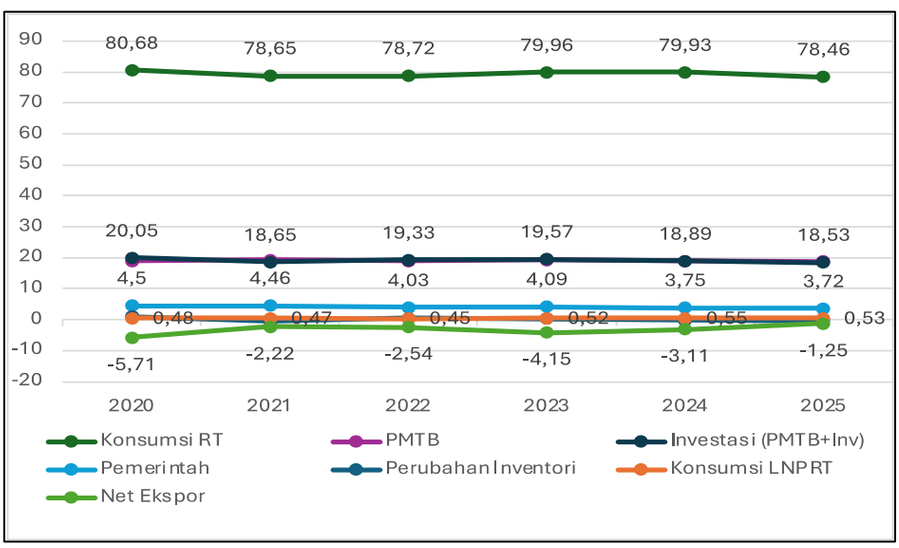


Gambar 1.4 Kontribusi Sektor Utama terhadap Perekonomian Kabupaten Bandung 2020-2025
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Perekonomian Kabupaten Bandung mengalami pergeseran struktur dari sektor primer (agrikultur) menjadi beralih ke sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data kontribusi sektor utama terhadap perekonomian Kabupaten Bandung periode 2020–2025, sektor Industri Pengolahan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi stabil di atas 50%. Hal ini, menunjukkan peran dominan sektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

mengalami tren peningkatan dari 12,35% pada 2020 menjadi 14,21% pada 2025. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami tren penurunan kontribusi dari 7,79% (2020) menjadi 6,77% (2024). Akan tetapi, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 7,58%. Adapun sektor Jasa Pendidikan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, dengan kontribusi di kisaran 3,34% hingga 3,48%.

Data kontribusi sektor utama terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama periode 2020–2025 menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan. Namun, stagnasi pada pertumbuhannya menunjukkan potensi kejenuhan jika tidak diimbangi dengan inovasi dan diversifikasi industri berbasis nilai tambah. Sektor perdagangan dan reparasi kendaraan menunjukkan tren positif, mencerminkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi lokal yang semakin dinamis. Walaupun sektor pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2025, tetap saja secara tren jangka panjang diramalkan akan mengalami penurunan kontribusi. Hal tersebut, mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis sumber daya alam dan perdesaan.



Gambar 1.5 Kontribusi PDRB Berdasarkan Pengeluaran terhadap Perekonomian 2019-2025

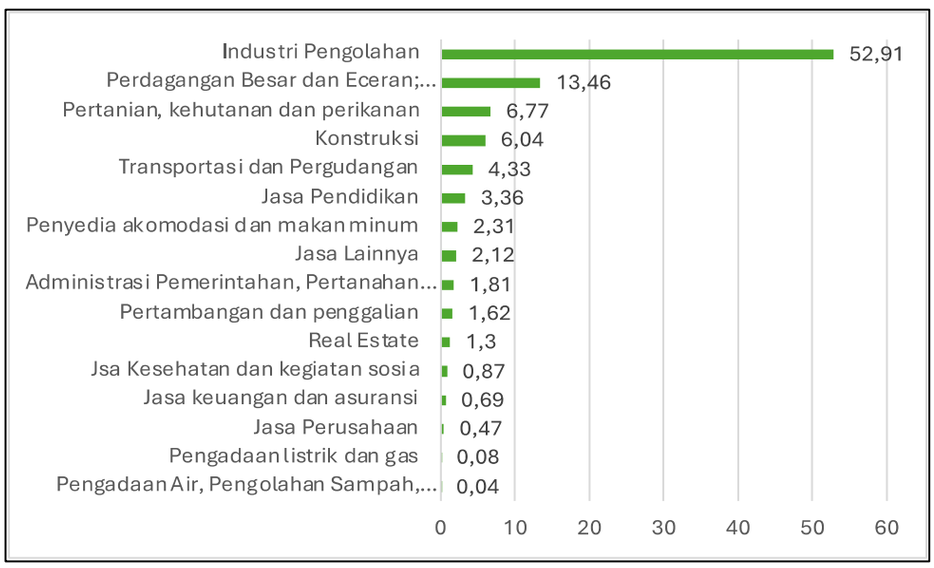
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Data PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi yang

tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dari 80,68% pada 2020 menjadi 78,46% pada 2025. Di sisi lain, peran investasi (PMTB) cenderung menurun dari 20,05% menjadi 18,53% pada periode yang sama. Pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan bertahap, sementara perubahan inventori menunjukkan fluktuasi. Net ekspor masih berada pada posisi negatif, meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun.

Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan fondasi ekonomi daerah yang lebih seimbang antara konsumsi, investasi, dan ekspor. Dalam konteks perencanaan RPJMD, arah kebijakan ke depan sebaiknya difokuskan pada upaya peningkatan iklim investasi yang lebih atraktif, mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta memperkuat peran belanja pemerintah sebagai pengungkit pertumbuhan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 1.6 Proporsi Sektor PDRB ADHB Kabupaten Bandung Tahun 2025
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Besarnya PDRB ADHK Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebesar Rp82,55 triliun sedangkan pada tahun 2025 telah mencapai Rp103,67 triliun. Pada rentang waktu 2019-2025, tingkat pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bandung menunjukkan tren

positif pada rentang -1,80-6,36% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,26%. Laju pertumbuhan ekonomi yang negatif atau penurunan PDRB ADHK hanya terjadi pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19.

Tabel 1.5 Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Lapangan Usaha		Nilai/ Kontribusi	PDRB ADHK Harga Konstan Tahun 2019-2025 (Milyar Rupiah)						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (dalam juta rupiah)	5.568,48	5.575,89	5.646,20	5.582,33	5.761,30	5.539,35	6.488,00
		Kontribusi kategori (%)	*6,75*	*6,88*	*6,73*	*6,31*	*6,21*	*5,68*	*6,26*
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam juta rupiah)	1.702,09	1.709,49	1.734,15	1.685,75	1.686,80	1.659,43	1.695,65
		Kontribusi kategori (%)	*2,06*	*2,11*	*2,07*	*1,91*	*1,82*	*1,70*	*1,64*
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam juta rupiah)	43.323,38	41.922,97	43.430,18	46.555,85	48.020,59	51.002,18	52.669,38
		Kontribusi kategori (%)	*52,48*	*51,72*	*51,73*	*52,64*	*51,73*	*52,30*	*50.80*
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam juta rupiah)	94,86	90	91,97	89,99	94,98	96,87	94,78
		Kontribusi kategori (%)	*0,11*	*0,11*	*0,11*	*0,10*	*0,10*	*0,10*	*0,09*
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam juta rupiah)	27,69	30,52	32,96	34,26	33,99	34,59	35,06
		Kontribusi kategori (%)	*0,03*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,03*
F	Konstruksi	Nilai (dalam juta rupiah)	5.524,71	5.602,97	5.666,93	5.731,10	6.167,41	6.337,59	6.662,26
		Kontribusi kategori (%)	*6,69*	*6,91*	*6,75*	*6,48*	*6,64*	*6,50*	*6,43*
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam juta rupiah)	10.652,38	10.259,70	10.963,58	11.471,73	12.143,65	12.989,46	14.554,50
		Kontribusi kategori (%)	*12,90*	*12,66*	*13,06*	*12,97*	*13,08*	*13,32*	*14,04*
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam juta rupiah)	2.916,67	2.795,90	2.736,22	3.020,05	3.408,17	3.697,58	4.395,17
		Kontribusi kategori (%)	*3,53*	*3,45*	*3,26*	*3,41*	*3,67*	*3,79*	*4,24*
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam juta rupiah)	2.030,80	1.967,50	1.970,20	2.070,81	2.310,56	2.261,69	2.551,04
		Kontribusi kategori (%)	*2,46*	*2,43*	*2,35*	*2,34*	*2,49*	*2,32*	*2,46*
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam juta rupiah)	1.944,22	2.464,99	2.700,28	2.859,97	3.111,48	3.253,54	3.429,51
		Kontribusi kategori (%)	*2,36*	*3,04*	*3,22*	*3,23*	*3,35*	*3,34*	*3,31*
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam juta rupiah)	573,7	606,53	628,41	615,59	652,15	676,71	688,24
		Kontribusi kategori (%)	*0,69*	*0,75*	*0,75*	*0,7*	*0,7*	*0,69*	*0,66*
L	Real Estate	Nilai (dalam juta rupiah)	1.113,27	1.109,15	1.249,68	1.321,03	1.432,92	1.530,28	1.627,70
		Kontribusi kategori (%)	*1,35*	*1,37*	*1,49*	*1,49*	*1,54*	*1,57*	*1,57*

Lapangan Usaha		Nilai/ Kontribusi	PDRB ADHK Harga Konstan Tahun 2019-2025 (Milyar Rupiah)						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam juta rupiah)	405,35	347,52	379,98	408,99	447,93	469,27	485,66
		Kontribusi kategori (%)	*0,49*	*0,43*	*0,45*	*0,46*	*0,48*	*0,48*	*0,47*
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam juta rupiah)	1.593,40	1.491,42	1.451,99	1.454,50	1.497,26	1.759,24	1.782,00
		Kontribusi kategori (%)	*1,93*	*1,84*	*1,73*	*1,64*	*1,61*	*1,80*	*1,72*
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam juta rupiah)	2.587,15	2.697,74	2.832,43	2.885,12	3.101,79	3.189,70	3.363,55
		Kontribusi kategori (%)	*3,13*	*3,33*	*3,37*	*3,26*	*3,34*	*3,27*	*3,24*
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam juta rupiah)	708,39	684,26	709,13	785,65	890,13	870,85	927,44
		Kontribusi kategori (%)	*0,86*	*0,84*	*0,84*	*0,89*	*0,96*	*0,89*	*0,89*
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam juta rupiah)	1.730,90	1.704,42	1.725,07	1.865,63	2.069,54	2.141,56	2.223,05
		Kontribusi kategori (%)	*2,10*	*2,10*	*2,05*	*2,11*	*2,23*	*2,20*	*2,14*
Total PDRB ADHB		Jumlah	82.547,44	81.060,97	83.949,37	88.437,96	92.830,17	97.509,96	103.673,00
Total Kontribusi Kategori terhadap PDRB		*%*	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini diindikasikan dari terjadinya kenaikan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori Tahun 2019-2025

Lapangan Usaha		PDRB ADHK Tahun 2019-2025						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,45	0,13	1,26	-1,13	3,21	-3,85	17,13
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,63	0,43	1,44	-2,79	0,06	-1,62	2,18
C	Industri Pengolahan	9,05	-3,23	3,6	7,2	3,15	6,21	3,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,89	-5,13	2,19	-2,16	5	2,53	-2,16
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,06	10,24	7,99	3,95	-0,8	1,75	1,35
F	Konstruksi	4,11	1,42	1,14	1,13	7,61	2,76	5,12
G	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,49	-3,69	6,86	4,63	5,86	6,97	12,05
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	-4,14	-2,13	10,37	12,85	8,49	18,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,22	-3,12	0,14	5,11	11,58	-2,12	12,79
J	Informasi dan Komunikasi	10,61	23,61	9,54	5,91	8,79	4,57	5,41

Lapangan Usaha		PDRB ADHK Tahun 2019-2025						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	5,72	3,61	-2,1	6,01	3,77	1,70
L	Real Estate	9,73	-0,37	12,67	5,71	8,47	6,79	6,37
M, N	Jasa Perusahaan	8,78	-14,27	9,34	7,63	9.52	4,76	3,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	-6,4	-2,64	0,17	2,94	17,5	1,29
P	Jasa Pendidikan	6,35	4,27	4,99	1,86	7,51	2,83	5,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18	-3,41	3,63	10,79	13,3	-2,17	6,50
R,S,T, U	Jasa Lainnya	7,84	-1,53	1,21	8,15	10,93	3,48	3,81
PDRB ADHK		**6,36**	**-1,8**	**3,56**	**5,35**	**4,97**	**5,04**	**6,32**

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Rata-rata pertumbuhan terbesar selama tahun 2019-2025 terjadi pada sektor informasi dan komunikasi (9,78%), real estate (7,05%), serta transportasi dan pergudangan (6,82%). Adapun tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2025 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor berikut ini: (1) transportasi dan pergudangan (18,87%); (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan (17,13%); serta (3) penyediaan akomodasi makan dan minum (12,79%).

B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan seluruh jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah atau wilayah tersebut. Itulah sebabnya, indikator PDRB Per Kapita dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan dan tingkat keberhasilan pembangunan sebuah daerah, karena semakin besar PDRB per-kapitanya, maka kondisi kesejahteraan masyarakat dinilai memiliki kecenderungan yang lebih tinggi. Di sisi lain, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Adapun besar kecilnya nilai PDRB bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi produktivitas di daerah tersebut.

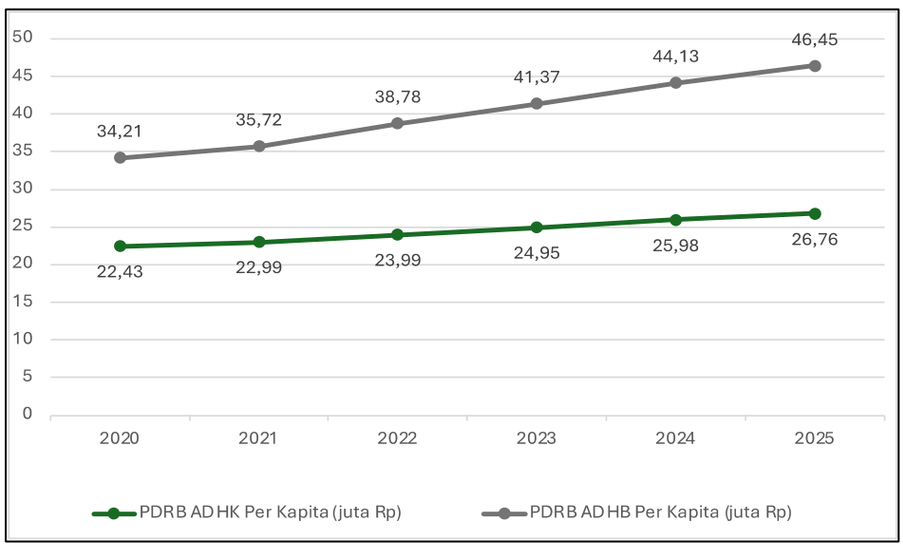
Tabel 1.7 Pendapatan Per-Kapita (ADHB) Kabupaten Bandung 2019-2025

Deskripsi	Satuan	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB ADHB	Milyar Rupiah	123.985,75	123.602,78	130.476,83	143.002,07	153.950,74	165.609,36	179.920,82
PDRB ADHK	Milyar Rupiah	82.547,44	81.060,97	83.949,37	88.437,96	92.830,17	97.509,91	103.673,00

Deskripsi	Satuan	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Pertengahan Tahun	Jiwa	3.775.279	3.623.790	3.666.156	3.718.660	3.721.111	3.839.721	3.873.653
PDRB/Kapita (ADHB)/Tahun	Rupiah	32.841.480	34.108.704	35.589.547	38.455.269	41.372.251	43.130.571	46.447.324
PDRB/ Kapita (ADHK)/Tahun	Rupiah	21.865.256	22.369.114	22898472	23.782.212	24.946.896	25.395.046	26.763.625

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pendapatan per kapita kabupaten Bandung secara nominal sebesar Rp 46,47 juta. Besarnya indikator ini juga dipengaruhi oleh faktor tingkat inflasi deflator. Adapun indikator PDRB per kapita rill memperhitungkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena telah membuang atau tidak dipengaruhi faktor inflasi. Itulah sebabnya, digunakan pendekatan atas dasar harga konstan (ADHK). Oleh karena itu, semakin besar indikator ini maka masyarakat memiliki kesejahteraan yang lebih besar, karena mampu untuk mengonsumsi lebih banyak lagi kuantitas barang dan jasa, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDRB Per kapita rill memiliki tren yang meningkat sepanjang tahun 2020-2025. Hal ini, mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan secara terus menerus, tetapi tidak memperlihatkan atau memperhitungkan masalah-masalah lainnya seperti kesenjangan pendapatan dan lain sebagainya.



Gambar 1.7 Grafik PDRB Per-Kapita Kabupaten Bandung
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

C. Laju Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya harga barang-barang dan jasa secara keseluruhan. Pada tahun 2024, tekanan inflasi di Kabupaten Bandung tergolong terkendali dengan angka 1,46%. Nilai tersebut masih lebih rendah dari interval target 1,59%–2,79%. Hal ini menandakan kinerja pengendalian inflasi yang terus membaik, seiring dengan intervensi stabilisasi harga melalui program pasar murah, pengendalian distribusi pangan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan daerah. Kemudian, pada tahun 2025, inflasi mengalami kenaikan hingga menyentuh angka angka 2,13%. Nilai tersebut tidak lebih rendah dari kisaran target 2,47%–2,65%. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satu diantaranya terjadi kenaikan harga produksi serta meningkatnya permintaan pasar. Hal ini tentunya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menstimulus peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang yang jauh lebih optimal dalam merancang skema penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.8 Capaian dan Target Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

Inflasi	2023	2024	2025
Target	5,41	1,59-2,79	2,47-2,65
Capaian	4,11	1,46	2,13

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Penganggur dalam konsep ini adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau telah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai bekerja Semakin tinggi TPT menunjukan kurang termanfaatkannya angkatan kerja. Pada tahun 2025, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung mencapai angka 6,68% dari target 6,15%-6,70%.

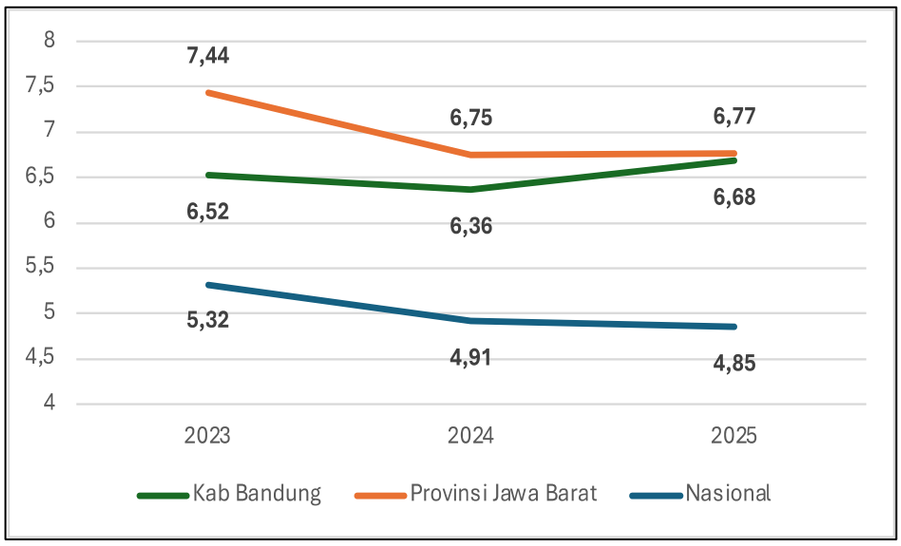
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dan terindikasi penyerapan angkatan kerja kurang berjalan optimal. Capaian TPT tahun 2025 untuk pertama kalinya selama tiga tahun terakhir (2023-2025) tidak lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan. Selain itu, kondisi TPT di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2025 berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi yang justru meningkat. Hal ini berbeda dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang menunjukkan adanya keselarasan antara penurunan TPT dengan peningkatan LPE pada tahun yang sama. Kondisi tersebut salah satunya didukung oleh meningkatnya investasi yang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.9 Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

TPT	2023	2024	2025
Target (%)	6,74	6,50	6,15-6,70
Capaian (%)	6,52	6,36	6,68

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

Untuk memahami posisi dan tren TPT Kabupaten Bandung dalam konteks yang lebih luas, dilakukan perbandingan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2023–2025. Grafik berikut menyajikan dinamika TPT di ketiga wilayah tersebut, yang dapat menjadi dasar analisis efektivitas kebijakan ketenagakerjaan daerah.



Gambar 1.8 Perbandingan TPT Daerah dengan Capaian Nasional dan Jawa Barat Tahun 2023-2025

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Gambar di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung mengalami tren penurunan kemudian peningkatan kembali di tahun 2025, dan pada tahun 2025 TPT mencapai

6,68%. Angka tersebut lebih tinggi sekitar 0,32% dari tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan ketimbangan di Kab. Bandung dibanding tahun sebelumnya, bahkan berada jauh di atas nasional. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penurunan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan serta membaiknya daya serap pasar kerja di daerah.

E. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0–1 (0 < koefisien gini <1). Koefisien gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi nilai koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya, gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan teori gini ratio. secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 0,00 < G < 0,35 : pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- 0,35 < G < 0,50 : pemerataan / ketimpangan sedang
- G > 0,50 :pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Perbaikan tingkat pemerataan pendapatan tercermin pada tahun 2024, ketika Gini Ratio menurun menjadi 0,346 dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,348. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan atau berkurangnya tingkat ketimpangan di Kabupaten Bandung pada periode tersebut. Akan tetapi, di tengah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan. Itulah sebabnya, indikator ini meningkat menjadi sebesar 0,385.

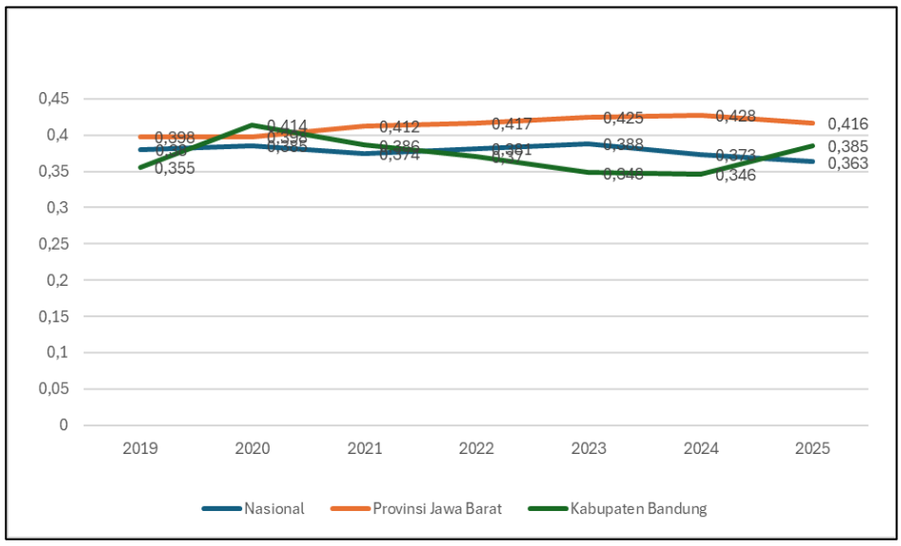
Tabel 1.10 Capaian dan Target Indeks Gini Kabupaten Bandung
Tahun 2023-2025

Indeks Gini	2023	2024	2025
Target	0,365	0,342-0,355	0,339-0,352
Capaian	0,348	0,346	0,385

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

Kondisi indeks gini Kabupaten Bandung dari tabel diatas menunjukkan pola fluktuatif yang dapat dipengaruhi oleh beragam faktor salah satunya adalah ketimpangan pendapatan masayarakat. Namun jika dilakukan perbandingan dengan indeks gini Jawa Barat, Kabupaten Bandung menunjukkan pola yang lebih beragam sementara provinsi mengalami

peningkatan ketimpangan dari 0,398 (2019) ke 0,416 (2025). Secara nasional, gini ratio lebih stabil, turun dari 0,380 (2019) menjadi 0,363 (2025).



Gambar 1.9 Grafik Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2025

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

F. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Semakin rendah nilai tingkat kemiskinan, semakin baik kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Persentase kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2025 kembali menurun cukup signifikan menjadi 6,04%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kemiskinan menurun sebesar 0,15% dari 6,19% di tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, yakni bebesar 5,95%. Dengan kondisi capaian tersebut, upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi kesejahteraan masyarakat secara merata dan menggambarkan kondisi pemantapan daya saing daerah. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat terus berjalan melalui kolaborasi dan sinergitas unsur pentahelix, mulai dari kementerian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pihak swasta, akademis, media hingga gotong royong seluruh masyarakat. Perbandingan antara tren tingkat kemiskinan daerah dengan target yang ditetapkan di dalam RKPD

Kabupaten Bandung pada rentang waktu tahun 2023-2025 disajikan pada tabel berikut.

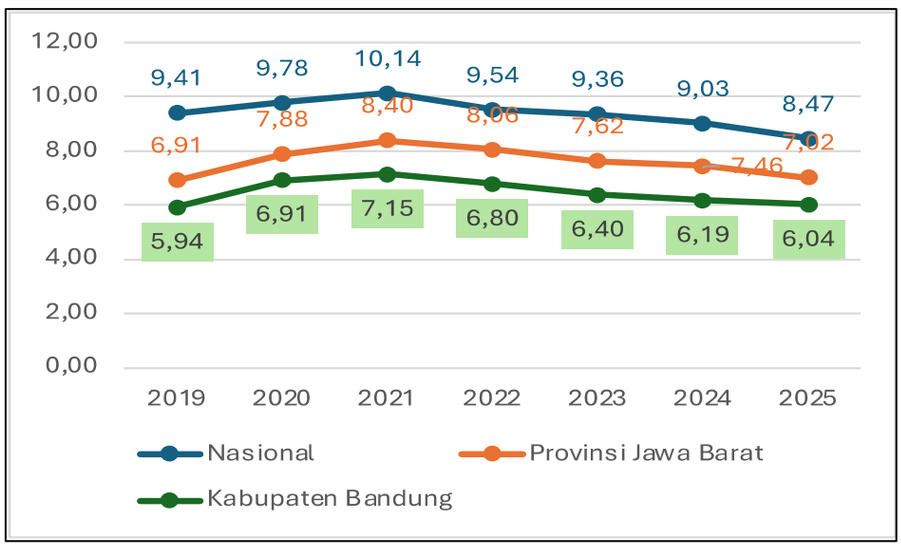
Tabel 1.11 Capaian dan Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

Tingkat Kemiskinan	2023	2024	2025
Target (%)	6,67	5,83-6,31	5,95
Capaian (%)	6,40	6,19	6,04

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

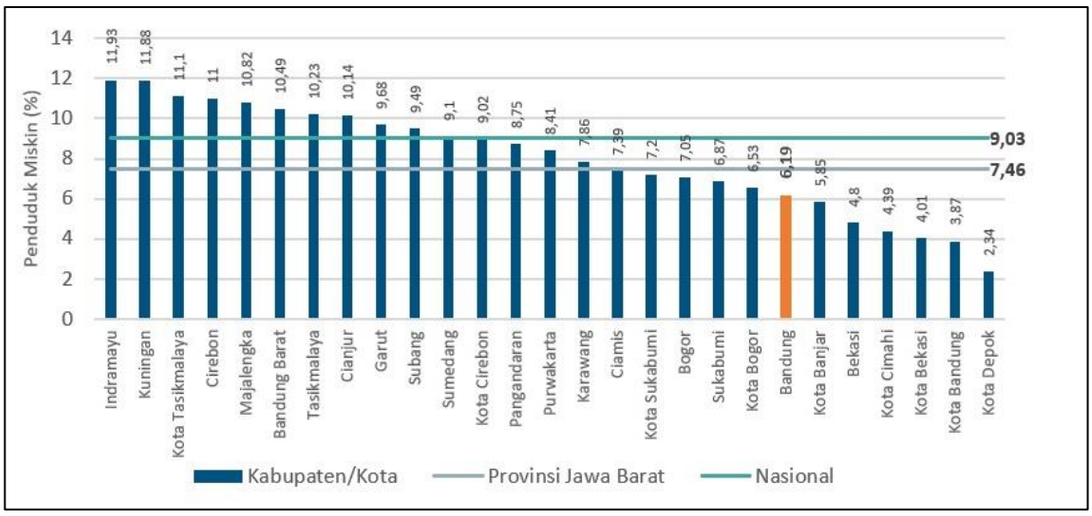
Dalam lingkup nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kabupaten Bandung, tingkat kemiskinan memiliki kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mencatat lonjakan tingkat kemiskinan yang signifikan, yang sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan lapangan kerja. Di Kabupaten Bandung, pandemi menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan dari 5,94% pada 2019 menjadi 6,91% pada 2020. Meskipun demikian, laju kenaikan tersebut relatif lebih terkendali dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan sempat meningkat menjadi 7,15%, sebelum kemudian mengalami tren penurunan pada periode 2022–2024 hingga mencapai 6,19% pada tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan bahwa setelah tekanan berat akibat pandemi, upaya pemulihan ekonomi dan program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah mulai menunjukkan hasil positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tren tersebut terus berlanjut pada tahun 2025, yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan yang kembali menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 1.10 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2019-2024
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Bandung menunjukkan kinerja yang baik dalam penanganan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional, dengan selisih rata-rata masing-masing sebesar 1,27% dan 2,84%. Dalam konteks provinsi, Kabupaten Bandung menempati peringkat ke-21 dari 27 kabupaten/kota, atau berada di kelompok dengan tingkat kemiskinan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung berhasil menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Jawa Barat. Konsistensi tingkat kemiskinan yang relatif rendah di Kabupaten Bandung mengindikasikan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah telah berjalan cukup efektif dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sistematis serta efektif untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang teridentifikasi. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi tantangan strategis yang memerlukan perhatian berkelanjutan, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan serta memperkuat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi di tingkat lokal.



Gambar 1.11 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026

1.3.4 Kondisi Pembangunan Manusia

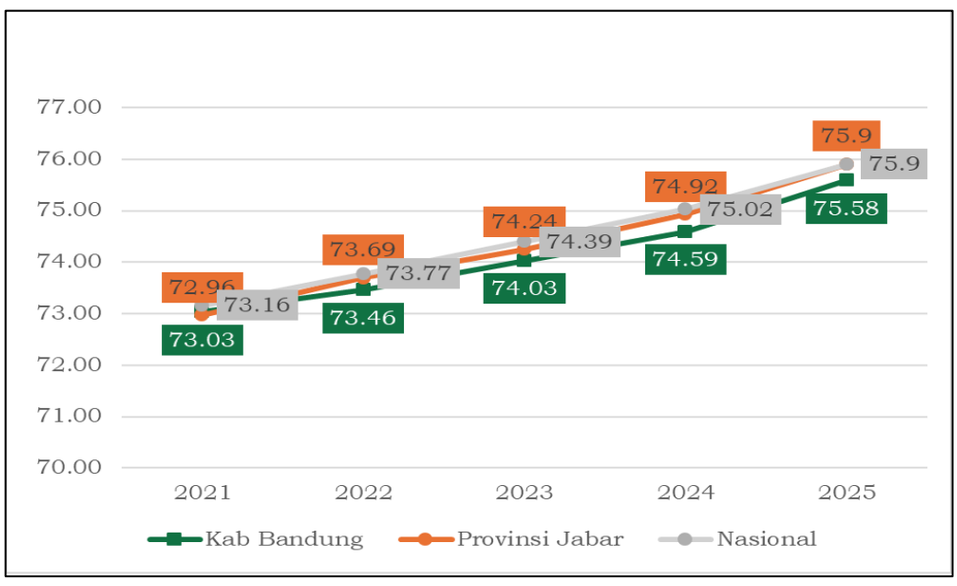
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup meliputi dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif sepanjang periode 2023-2025, dengan kenaikan dari 74,03 pada 2023 menjadi 75,58 pada 2025.

Tabel 1.12 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

IPM	2023	2024	2025
Target	73,61	74,32	75,06
Capaian	74,03	74,59	75,58

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

Sejak 2020, capaian IPM di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menujukan bahwa kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Bandung semakin membaik yang didukung dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun demikian, angka IPM Kabupaten Bandung masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (75,9) dan nasional (75,9) mengacu pada data tahun 2025. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi peningkatan capaian komponen pendukung IPM terutama yang berkaitan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, peningkatan usia harapan hidup, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sandingan capaian dan target IPM hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.



Gambar 1.12 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung
Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2027

A. Dimensi Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan digambarkan melalui dimensi umur panjang dan hidup sehat. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, UHH Kabupaten Bandung mencapai 74,92 tahun dan pada tahun 2025 berhasil mencapai 75,70 tahun. Peningkatan harapan hidup masyarakat Kabupaten Bandung didukung oleh adanya inovasi layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam rangka mendukung peningkatan rata-rata usia hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong masyarakat untuk terus melakukan pola hidup bersih dan sehat. Penjabaran target dan capaian UHH Kabupaten Bandung dalam tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Capaian dan Target Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

UHH	2023	2024	2025
Target	74,35	74,92	75,42
Capaian	74,92	75,23	75,70

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

B. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dalam pembangunan manusia digambarkan melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 tahun ke atas.

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Bandung tahun 2025, berhasil meningkat kembali mencapai 12,99 tahun dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 12,74 tahun. Capaian HLS tahun 2025 memiliki arti bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,99 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga

setingkat Diploma I. Peningkatan pada dimensi pendidikan merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat salah satunya melalui program pendidikan penyetaraan, peningkatan pada sarana pendidikan menengah dan program beasiswa bagi anak-anak hafiz Qur'an dan anak-anak berprestasi. Berdasarkan target yang ditetapkan, capaian tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 12,76. Penjabaran target dan capaian HLS Kabupaten Bandung tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.14 Capaian dan Target Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

HLS	2023	2024	2025
Target	12,78	12,73	12,76
Capaian	12,73	12,74	12,99

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator lain yang menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bandung tahun 2025 meningkat sebesar 0,25 tahun menjadi 9,40 tahun dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian 9,15 tahun. Capaian RLS tersebut dimaknai bahwa rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bandung setara dengan kelas 9 SMP atau lulus SMP. Peningkatan pada dimensi pendidikan merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat salah satunya melalui program pendidikan penyetaraan, peningkatan pada sarana pendidikan menengah dan program beasiswa bagi anak-anak hafiz Qur'an dan anak-anak berprestasi. Berdasarkan target yang ditetapkan, capaian tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,23. Penjabaran target dan capaian RLS Kabupaten Bandung tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.15 Capaian dan Target Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

RLS	2023	2024	2025
Target	9,13	9,19	9,23
Capaian	9,10	9,15	9,40

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

C. Dimensi Pengeluaran Per Kapita

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita digunakan untuk menggambarkan pola konsumsi rumah tangga secara umum, menggunakan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan yang nantinya dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bandung mencapai 11,619 juta rupiah per tahun atau naik sebesar 277 ribu rupiah bila dibandingkan dengan tahun 2024. Kemudian, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2025, realisasi capaian di tahun 2025 berhasil melebihi target. Tren capaian dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di Kabupaten Bandung terus meningkat dari tahun ketahun dan berhasil mencapai besaran pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan capaian sebelum terjadi pandemi di tahun 2020. Peningkatan tersebut tentunya turut dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung seiring dengan sektor-sektor perekonomian yang mulai bertumbuh positif. Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat telah berdampak positif pada peningkatan pengeluaran per kapita. Capaian dan target pengeluaran per kapita disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.16 Capaian dan Target Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025

PPK	2023	2024	2025
Target (Ribu Rupiah)	10.735	10.994,2	11.126,1
Capaian (Ribu Rupiah)	11.018	11.392	11.619

Sumber: RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;, Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2026

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sekaligus menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Penerapan SPM bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar yang esensial, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berkomitmen penuh dalam menyelenggarakan pelayanan SPM dari waktu ke waktu ditandai dengan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar pada keenam bidang SPM.

Secara umum, realisasi SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan kinerja secara progresif yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase keberhasilan setiap indikator dalam memenuhi nilai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa tantangan atau kendala pada sejumlah layanan sehingga diperlukan perhatian dan intervensi spesifik untuk membantu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas penyelenggaraan pelayanan dasar pada periode berikutnya. Adapun gambaran mengenai kondisi pemenuhan SPM dijabarkan melalui data realisasi SPM Tahun 2025 di Kabupaten Bandung dengan data sebagai berikut :

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1. Kondisi Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025

SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (RP.)	Realisasi Anggaran SPM (RP.)
Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.476	104.224	100	617.295	580.192	100	39.672	25.089	100	287.530.233.220	277.791.914.230

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2. Kondisi Capaian Bidang Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2025

SPM Bidang Kesehatan								
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.215	25.232	100	62.215	25.232	100	59.441	24.107	100

SPM Bidang Kesehatan								
Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
344.174	118.113	100	617.295	226.284	100	2.312.126	1.007.541	100

SPM Bidang Kesehatan								
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
385.342	159.014	100	280.876	112.266	100	62.417	24.948	100

SPM Bidang Kesehatan									Pagu Anggaran SPM (RP.)	Realisasi Anggaran SPM (RP.)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosisi			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.298	2.148	100	68.543	27.398	100	77.507	30.980	100	1.330.305.100	1.018.954.931

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3. Kondisi Capaian Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025

SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (RP.)	Realisasi Anggaran SPM (RP.)
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	11
346.240	7.372	100	356.825	5.440	100	63.215.510.490	60.979.108.659

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4. Kondisi Capaian Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Tahun 2025

SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (RP.)	Realisasi Anggaran SPM (RP.)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah/Kota			Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	11
2.473.110	87	100	-	-	-	825.000.000	822.185.492

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5. Kondisi Capaian Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2025

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.663.437	1.800	100	2.473.110	500.000	100	2.473.110	250.000	100

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						Pagu Anggaran SPM (RP.)	Realisasi Anggaran SPM (RP.)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	11
100.000	100.000	100	3.633.437	301	100	57.271.704.561	53.985.618.969

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2.6. Kondisi Capaian Bidang Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025

SPM Bidang Sosial								
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.161	557	100	3.266	216	100	13.508	1.095	100

SPM Bidang Sosial						Pagu Anggaran SPM (RP.)	Realisasi Anggaran SPM (RP.)
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	11
408	210	100	2.473.110	6.510	100	9.126.693.725	8.187.673.163

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Tahun 2025

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bandung teridentifikasi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja penerapan SPM. Informasi permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

1) Pada aspek data dan informasi, masih ditemukan kendala berupa kualitas data sasaran yang belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terintegrasi antar perangkat daerah. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan layanan belum berjalan secara optimal sehingga memengaruhi ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan dasar.
2) Dari sisi sumber daya manusia, permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah tenaga pelaksana, distribusi SDM yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Kondisi ini berdampak pada beban kerja yang tinggi dan belum optimalnya penyelenggaraan beberapa jenis layanan.
3) Pada aspek anggaran, keterbatasan pendanaan masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, terutama untuk mendukung operasional layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengadaan sarana dan prasarana. Sejalan dengan hal tersebut, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan untuk mendukung efektivitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat.
4) Dari sisi operasional juga menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pelaksanaan layanan sesuai standar yang ditetapkan, keterbatasan jangkauan pelayanan, serta rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa jenis layanan. Kondisi

tersebut diperparah oleh belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan SPM.

5) Dari aspek kelembagaan dan regulasi, masih diperlukan penguatan tata kelola melalui penyempurnaan struktur dan mekanisme kelembagaan, penyusunan rencana aksi yang lebih terarah, serta penyediaan regulasi dan standar operasional prosedur yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dasar.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Belum optimalnya pencatatan (By Name By Address) dan pelaporan baik dari fasilitas kesehatan swasta maupun pemerintah.
- Adanya kekurangan bidan desa dan puskesmas karena pensiun atau pindah tempat kerja (rotasi, mutasi, pensiun belum ada pengganti).
- Belum semua dokter umum puskesmas terlatih USG Dasar Terbatas.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Belum optimalnya pencatatan (By Name By Address) dan pelaporan baik dari fasilitas kesehatan swasta maupun pemerintah.
- Masih ada persalinan yang ditolong oleh paraji.
- Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih banyak yang ditolong tidak di Fasilitas Kesehatan (fasyankes).
- Adanya kekurangan bidan desa dan puskesmas karena pensiun atau pindah tempat kerja (rotasi, mutasi, pensiun belum ada pengganti).

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Belum optimalnya pencatatan (By Name By Address) dan pelaporan baik dari fasilitas kesehatan swasta maupun pemerintah.
- Adanya kekurangan bidan desa dan puskesmas karena pensiun atau pindah tempat kerja (rotasi, mutasi, pensiun belum ada pengganti).
- Kunjungan bayi ke-1 sampai ke-3 belum sesuai interval waktunya, dan belum semua faskes melaksanakan skrining BBL.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

- Pencatatan dan pelaporan belum optimal, perlu perbaikan pencatatan dan pelaporan di Kohort Balita, terutama di posyandu dan integrasi program dengan data Gizi.
- Adanya kekurangan bidan desa dan puskesmas karena pensiun atau pindah tempat kerja (rotasi, mutasi, pensiun belum ada pengganti).
- Belum seluruh pengelola program Balita di Puskesmas mendapatkan pelatihan update MTBS dan SDIDTK.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

- Pencatatan dan pelaporan yang belum optimal.
- SDM Kesehatan yang masih belum maksimal dalam skrining usia dasar dikarenakan merangkap dengan pelayanan yang lain.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

- Keterbataan SDM dengan jumlah target sasaran yag harus diskrining serta adanya rangkap pekerjaan SDM kesehatan.
- Kapasitas SDM dalam pencatatan dan pelaporan online tergolong masih terbatas.
- Sebagian kader masih belum percaya diri dalam melaksanakan pemeriksaan PTM secara mandiri sehingga masih mengandalkan tenaga kesehatan.
- Pembentukan kader & pemeriksaan skrining di tempat kerja belum optimal.

- Pada saat pemeriksaan, sebagian peserta tidak membawa identias diri sehingga tidak tercatat ke dalam SIPTM dan ASIK.

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

- Pencatatan dan pelaporan program lansia sebagian besar belum menggunakan Kohort lansia.
- Laporan dari jejaring tentang pelayanan lansia belum optimal.
- Persediaan buku kesehatan lansia cenderung sangat terbatas.
- Hanya ada 6 Puskesmas yang memperoleh pelatihan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Ketersediaan Stik kolesterol untuk skrining lansia terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah sasaran.
- Belum semua Puskesmas melaksanakan pelayanan luar gedung (Posyandu Lansia).
- Hanya ada 5 Rumah Sakit yang memiliki poli geriatri.
- Kompetensi skrining lansia sederhana (SEKILAS) belum merata.
- Beban kerja petugas tinggi sala satunya disebabkan oleh adanya rangkap program.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- Terbatasnya alokasi anggaran pengelolaan pelayanan bagi penderita Hipertensi serta adanya perubahan anggaran yang sering terjadi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan layanan hipertensi.
- Terbatasnya jumlah SDM di puskesmas untuk melakukan entri data hasil pelayanan kesehatan dan belum tersedianya tenaga khusus pengentri data di puskesmas.
- Jumlah aplikasi yang digunakan tergolong cukup banyak dan belum didukung secara optimal.
- Penentuan target sasaran dinilai belum seragam.
- Peran lintas sektor dalam melakukan edukasi dan penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan gerakan hidup sehat belum optimal.
- Belum terbangun koordinasi dan kerjasama yang optimal antar OPD dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

- Sarana dan prasarana layanan hipertensi masih cukup terbatas.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

- Kasus Diabetes Mellitus di rumah sakit yang tanpa rujukan dari puskesmas belum terdata dan terlaporkan secara maksimal.
- Kasus DM yang dilayani di fktp swasta belum terlaporkan secara optimal dikarenakan di fktp swasta tidak diwajibkan membawa ktp.
- Koordinasi dengan lintas program di puskesmas belum optimal
- Adanya perbedaan jumlah data manual/offline dan Data Aplikasi (SIPTM).
- Pada saat pemeriksaan, sebagian peserta tidak membawa identitas diri sehingga tidak tercatat ke dalam SIPTM dan ASIK.
- Tidak semua desa mempunyai glukometer mandiri.
- Adanya kekurangan stok obat DM di beberapa puskesmas.

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

- Kurangnya Literasi Kesehatan Jiwa di Masyarakat.
- Masih adanya stigma di masyarakat mengenai pasien ODGJ.
- Kurangnya Kepatuhan minum obat pada pasien ODGJ & minimya dukungan keluarga terhadap Kepatuhan minum obat.
- Pasien tidak memiliki biaya untuk mengakses faskes.
- Penyalahgunaan obat kesehatan jiwa di luar resep dokter.
- Penolakan di masyarakat/pasien yang sudah pulang dari perawatan di RS.
- Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih keswa untuk deteksi dini masih kurang.
- Deteksi dini gangguan jiwa masih pasif, sebatas yang datang ke puskesmas.
- Alur pelayanan dan rujukan kasus gangguan jiwa (keswa) belum optimal.
- Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penemuan dan penanganan kasus keswa masih belum optimal.
- Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini gangguan jiwa masih rendah.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosisi

- Masih sedikit DPM/Klinik yang menggunakan SITB atau WIFI TB sebagai alat pencatatan dan pelaporan terduga dan/atau kasus TBC.
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan berbasis online yaitu SITB atau WIFI TB.
- Banyak pengelola Program TBC yang mengalami pergantian dan pembaharuan.

12) Pelayanan Kesehatan Orang denag Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- Kelompok rentan yang tersisih kelompok populasi kunci, seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, atau lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), sering kali tidak terjangkau karena stigma atau kriminalisasi.
- Rendahnya minat untuk tes banyak individu takut stigma sosial dan diskriminasi jika mereka diketahui menjalani tes HIV serta pandangan keliru tentang HIV sering menghalangi orang untuk melakukan tes.
- Di beberapa lokasi, jumlah alat tes sering kali terbatas atau kualitasnya kurang baik.
- Kurangnya konseling yang baik beberapa pasien merasa tidak nyaman karena pendekatan layanan yang kaku atau tidak empati.
- Kolaborasi program tripel eliminasi untuk ibu hamil belum berjalan secara beriringan dan berkesinambungan.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

- Belum Semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal.

- Pengelola sistem air bersih tidak optimal pada lembaga pengelolaan SPAM yang dikelola masyarakat.
- Belum terbentuknya KPSPAM di beberapa wilayah.
- Sebaran sumber air baku tidak merata, sehingga tidak semua desa memiliki potensi sumber air baku untuk air minum khususnya yang bersumber dari jaringan perpipaan.
- Terdapat lokasi air baku yang tidak berada pada lahan masyarakat melainkan lahan milik PERHUTANI.
- Daya dukung dan kualitas air baku semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik.
- Adanya perselisihan terhadap pemanfaatan SPAM dengan pemanfaatan air yang lainnya.
- Sarana dan prasarana terhadap infrastruktur SPAM jaringan perpipaan masih kurang memadai.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air baku.
- Adanya potensi konflik antar wilayah dan antar pengguna.
- Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional.
- Keterbatasan kemampuan fiskal keuangan.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- Ketersediaan lahan untuk kebutuhan SPLAD-T masih cukup terbatas dan sumber anggaran masih bergantung kepada dana DAK.
- Terjadi penolakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan SPALDS/SPALDT dikarenakan persepsi masyarakat terhadap bangunan air limbah masih negatif (menimbulkan bau, kotor dan mengganggu lingkungan), sehingga diperlukan waktu lagi untuk mencari calon penerima manfaat dan lokasi pembangunan.
- Fasilitas pengolahan air limbah masih menggunakan metode konvensional karena dalam proses pembangunannya banyak menggunakan metode swakelola sehingga sangat berhubungan dengan masyarakat; dan
- Masih banyak wilayah pemukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar.
- Belum maksimalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga

dan memelihara fasilitas sanitasi terbangun.

- IPLT yang dimiliki belum beroperasional secara maksimal.
- Belum maksimalnya operasional mobil sedot tinja.
- Terbatasnya APBD untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang aman.
- Belum optimalnya sektor swasta untuk melakukan investasi sanitasi.
- Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat.
- Masih rendahnya keterlibatan peran perempuan dan masyarakat miskin dalam pengelolaan sanitasi.
- Belum optimalnya pemerintah daerah dalam melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pengelolaan air limbah domestik.
- Menurunnya peran aktif Pokja Sanitasi dan belum sinerginya pembagian peran pokja yang terkesan berjalan sendiri-sendiri Ketika implementasi.
- Belum ada master plan sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- Belum adanya data induk terkait rumah yang berpotensi terkena bencana alam.
- Penyediaan rumah layak huni masih direncanakan secara simultan mengingat data induk belum ada.
- Ketersediaan anggaran yang minim dalam penyediaan rumah bagi korban bencana.
- Belum adanya dokumen rumah rawan bencana.
- Kejadian bencana alam yang sukar untuk diprediksi.
- Sukarnya memiliki data yang valid terkait kerusakan rumah akibat korban bencana alam.
- Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang

berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibum Linmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pendidikan dan peningkatan SDM Pol PP belum sesuai Permendagri 71 tahun 2020.
- Pendataan warga di dalam radius penegakan perda/perkada masih dilaksanakan secara manual.
- Belum adanya standar baku pelayanan dampak penegakan perda/perkada.
- Di Jawa Barat ,belum ada standar perhitungan dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- Sarana dan prasaranan yang dimiliki Satpol PP Belum sesuai permendagri 17 Tahun 2019 baik secara kualitatif maupun kuantitatif diantaranya mobil patroli, kendaraan double cabin , mobil pengangkut pasukan, hingga kendaraan penindakan.
- Wilayah kabupaten bandung terdiri dari 31 kecamatan dan 270 desa dan 10 Kelurahan dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa sehingga memerlukan standar alat, yang memadari meliputi mobil patroli untuk satpol PP kecamatan di 31 kecamatan, standar alat.
- Luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah anggota satpol PP dan perlindungan masyarakat belum seimbang

2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam pelayanan kebencanaan.
- Belum optimalnya penganggaran dalam mendukung kegiatan penanganan kebencanaan.

- Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
- Belum tersedianya SOP penanggulangan kebencanaan.
- Belum terpenuhinya dokumen rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana alam yang ada di Kabupaten Bandung.
- Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- Minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam.
- Minimnya koordinasi multi pihak untuk melaksanakan upaya mitigasi dan penanggulangan kebencaan.

3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Kurangnya manajemen pengelola data dan informasi kebencanaan (mitigasi, saat bencana dan pasca bencana).
- Rendahnya kesadaran masyarakat, Dunia Usaha untuk berperan serta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana.
- Belum tersedianya informasi data mengenai warga masyarakat yang terpapar di wilayah rawan bencana.
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam pelayanan kebencanaan.
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana berbasis sertifikat.
- Belum optimalnya fungsi PUSDALOP dan sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi standar.
- Kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana tidak seimbang dengan kebutuhan berdasarkan rekomendasi BMD. Selain itu, terdapat beberapa kendaraan operasional eksisting berada dalam kondisi rusak.

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi sebelum hingga pasca bencana terjadi.
- Perlunya optimalisasi struktur organisasi kebencanaan diantaranya tersedianya tim pakar dalam penentuan kebijakan sebelum dan saat bencana terjadi.

- Sarana dan Prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi.
- Belum optimalnya Tim Reaksi Cepat (TRC).
- Belum tersedianya cluster logistik yang memenuhi standar.
- Belum tersedianya gudang peralatan.

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

- Luasnya jangkauan wilayah manajemen kebakaran berbanding terbalik dengan ketersedian anggaran untuk penyediaan serta pemeliharaan sumber air.
- Jumlah penerima layanan yang tergolong cukup besar tidak seimbang dengan jumlah SDM sub urusan kebakaran.
- Terbatasnya lembaga yang menyediakan sertifikasi kompetensi pemadam kebakaran dan rescue.
- Minimnya pengadaan ASN (PNS dan PPP) untuk petugas pemadam kebakaran.
- SOP masih menggunakan standar yang lama dan belum dilakukan pemutakhiran sesuai dengan faktual saat ini.
- Kontribusi relawan damkar dalam berkontribusi memenuhi capaian SPM cenderung masih rendah .
- Meningkatnya frekuensi operasi non kebakaran.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur, kondisi existing yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan bisa langsung memiskinkan masyarakat disamping menimbulkan ancaman terhadap efisiensi biaya investasi.
- Bencana Alam dan Ulah/perilaku manusia yang sering menimbulkan kebakaran.
- Cakupan layanan akses terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran masih rendah.
- Derajat pemahaman pencegahan dan pengendalian kebakaran masyarakat yang masih rendah.
- Cakupan layanan/akses dukungan sumber air untuk penanggulangan kebakaran masih relatif rendah.

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

- Banyaknya pengaduan di kewilayahan mengenai klien tanpa identitas sering kali melebihi SOP pelayanan.
- Jumlah pekerja sosial dalam menangani penyandang disabilitas terlantar tidak seimbang dengan kebutuhan klien yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial.
- Kekurangan personil khususnya tenaga medis yang merawat klien bedrest.
- Kurangnya biaya operasional dalam mendukung upaya pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat bantu dari masyarakat dan tidak tersedianya dukungan anggaran pemakaman bagi klien yang meninggal dunia.
- Adanya penolakan dari pihak keluarga dalam melakukan pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Sulitnya menelusuri keluarga klien menyebabkan pemberian makan minum melebihi SOP yang berlaku.
- Belum adanya kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti untuk penanganan penyediaan layanan kedaruratan.
- Kapasitas gedung tergolong cukup terbatas sehingga daya tampung untuk klien juga ikut terbatas dan menyebabkan klien bedrest, stabil dan tidak stabil menjadi bercampur.

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

- Banyaknya pengaduan di kewilayahan mengenai klien tanpa identitas sering kali melebihi SOP pelayanan.
- Jumlah pekerja sosial dalam menangani penyandang

disabilitas terlantar tidak seimbang dengan kebutuhan klien yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial.

- Kekurangan personil khususnya tenaga medis yang merawat klien bedrest.
- Kurangnya biaya operasional dalam mendukung upaya pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat bantu dari masyarakat dan tidak tersedianya dukungan anggaran pemakaman bagi klien yang meninggal dunia.
- Adanya penolakan dari pihak keluarga dalam melakukan pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Sulitnya menelusuri keluarga klien menyebabkan pemberian makan minum melebihi SOP yang berlaku.
- Belum adanya kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti untuk penanganan penyediaan layanan kedaruratan.
- Daya tampung panti sosial yang kurang memadai sehingga tidak dapat dilaksanakan layanan rujukan lembaga.
- Sulitnya melakukan komunikasi dengan pihak kewilayahan sehingga menghambat pemberian pelayanan.
- Data terkait Penerima Bantuan Sosial masih banyak yang belum akurat dan tidak tepat sasaran.

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

- Banyaknya pengaduan di kewilayahan mengenai klien tanpa identitas sering kali melebihi SOP pelayanan.
- Jumlah pekerja sosial dalam menangani penyandang disabilitas terlantar tidak seimbang dengan kebutuhan klien yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial.
- Kekurangan personil khususnya tenaga medis yang merawat klien bedrest.
- Kurangnya biaya operasional dalam mendukung upaya pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.

- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat bantu dari masyarakat dan tidak tersedianya dukungan anggaran pemakaman bagi klien yang meninggal dunia.
- Adanya penolakan dari pihak keluarga dalam melakukan pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Sulitnya menelusuri keluarga klien menyebabkan pemberian makan minum melebihi SOP yang berlaku.
- Belum adanya kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti untuk penanganan penyediaan layanan kedaruratan.
- Daya tampung panti sosial yang kurang memadai sehingga tidak dapat dilaksanakan layanan rujukan lembaga.
- Sulitnya melakukan komunikasi dengan pihak kewilayahan sehingga menghambat pemberian pelayanan.
- Data terkait Penerima Bantuan Sosial masih banyak yang belum akurat dan tidak tepat sasaran.

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

- Banyaknya pengaduan di kewilayahan mengenai klien tanpa identitas sering kali melebihi SOP pelayanan.
- Jumlah pekerja sosial dalam menangani penyandang disabilitas terlantar tidak seimbang dengan kebutuhan klien yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial.
- Kekurangan personil khususnya tenaga medis yang merawat klien bedrest.
- Kurangnya biaya operasional dalam mendukung upaya pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat bantu dari masyarakat dan tidak tersedianya dukungan anggaran pemakaman bagi klien yang meninggal dunia.
- Adanya penolakan dari pihak keluarga dalam melakukan

pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.

- Sulitnya menelusuri keluarga klien menyebabkan pemberian makan minum melebihi SOP yang berlaku.
- Belum adanya kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti untuk penanganan penyediaan layanan kedaruratan.
- Daya tampung panti sosial yang kurang memadai sehingga tidak dapat dilaksanakan layanan rujukan lembaga.
- Sulitnya melakukan komunikasi dengan pihak kewilayahan sehingga menghambat pemberian pelayanan.
- Data terkait Penerima Bantuan Sosial masih banyak yang belum akurat dan tidak tepat sasaran.
- Adanya daftar tunggu untuk melakukan layanan rujukan ke lembaga atau panti sosial.

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

- Banyaknya pengaduan di kewilayahan mengenai klien tanpa identitas sering kali melebihi SOP pelayanan.
- Jumlah pekerja sosial dalam menangani penyandang disabilitas terlantar tidak seimbang dengan kebutuhan klien yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial.
- Kekurangan personil khususnya tenaga medis yang merawat klien bedrest.
- Kurangnya biaya operasional dalam mendukung upaya pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Terbatasnya anggaran untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat bantu dari masyarakat dan tidak tersedianya dukungan anggaran pemakaman bagi klien yang meninggal dunia.
- Adanya penolakan dari pihak keluarga dalam melakukan pelayanan rujukan lembaga/reunifikasi klien.
- Sulitnya menelusuri keluarga klien menyebabkan pemberian makan minum melebihi SOP yang berlaku.

- Belum adanya kendaraan khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti untuk penanganan penyediaan layanan kedaruratan.
- Daya tampung panti sosial yang kurang memadai sehingga tidak dapat dilaksanakan layanan rujukan lembaga.
- Sulitnya melakukan komunikasi dengan pihak kewilayahan sehingga menghambat pemberian pelayanan.
- Data terkait Penerima Bantuan Sosial masih banyak yang belum akurat dan tidak tepat sasaran.
- Adanya daftar tunggu untuk melakukan layanan rujukan ke lembaga atau panti sosial.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk lima tahun ke depan yakni tahun 2026-2030.

Dalam rangka mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang memengaruhi implementasinya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran dan kapasitas Tim Penerapan SPM melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan SPM. Upaya tersebut perlu didukung oleh alokasi anggaran yang memadai serta pengintegrasian program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, pelaksanaan SPM dapat berlangsung secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi penerapan SPM di Kabupaten Bandung diintegrasikan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam Kepmendagri Nomor 900.1–861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusn Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
				Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
2	Pendidikan Sekolah Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik
				Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
				Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
				Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Orang
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Orang
3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik
				Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
				Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
				Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Orang
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Komunitas
4	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Peserta Didik
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang

3.1.2 SPM Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosisi			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang denag Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3.1.3 SPM Urusan Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sisten Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis SPAM	Dokumen
				Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
				Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik
				Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR
				Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik
				Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik
				Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR
				Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR
				Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
				Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
				Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
				Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
				Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
				Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
				Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit
				Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit
				Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
				Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-
				Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit
				Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit
				Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
				Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen
				Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga
				Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga
				Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga
				Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
				Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
				Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat
				Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
				Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
				Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen
				Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga
				Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
				Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M³/Hari
				Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M³/Hari
				Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari
				Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara
				Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
				Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen

3.1.4 SPM Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah/Kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
				Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
				Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
				Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
				Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
				Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
				Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
				Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
				Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
				Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
				Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
				Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah

3.1.5 SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
				Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
				Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
				Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen
				Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang
				Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
				Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Kasus
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
				Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
				Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
				Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit
				Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
				Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan
				Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
				Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan
				Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan
				Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang
				Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
				Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan
				Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
				Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-
				Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
				Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
				Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
				Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
				Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
				Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
				Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
				Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
				Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang
				Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga
				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
				Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
				Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
				Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
				Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
				Peningkatan kompetensi pejabat fungsional	Laporan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
				pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
				Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
				Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen
				Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
				Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
				Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
				Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
				Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
				Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa
				Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
				Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
				Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
				Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit

3.1.6 SPM Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	Orang
				Penyediaan sandang	Orang
				Penyediaan alat bantu	Orang
				Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
				Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
				Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
4	Rehabilitasi Sosial Dasar			Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			Pemberian layanan kedaruratan	Orang
				Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
				Pemberian layanan rujukan	Dokumen
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	Orang
				Penyediaan sandang	Orang
				Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
				Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
				Pelayanan dukungan Psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2026-2030

3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	Orang	104.224	77.332	77.332			22.026.761.192		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%	84,46			85,77	85,77				
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	67,09			64,8	64,8				
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%	93,35			85,29	85,29				
2	**Pendidikan Dasar**	**Orang**	580.192	532.367	532.367			141.115.526.556		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD										
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%	98,57			98,58	98,58				
b	Kemampuan Literasi	Nilai	66,13			61,66	61,66				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai	77,06			54,3	54,3				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	77,04			75,22	75,22				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	72,95			67,09	67,09				
f	Indeks iklim Inklusivitas	%	61,28			60,95	60,95				
	SMP										
a	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%	98,57			98,58	98,58				
b	Kemampuan Literasi	Nilai	77,46			73,47	73,47				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai	72,62			65,36	65,36				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	70,43			71,09	71,09				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	68,79			66,41	66,41				
f	Indeks Iklim Inkusivitas	%	57			60,67	60,67				

3	**Pendidikan Kesetaraan**	Orang	25.089	25.371	25.371			242.800.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-8 Tahun Keatas *Tidak masuk kedalam perhitungan	%	16,16			17,51	17,51				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Orang**	80.387	80.387			25.988.617.300		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			86,99	86,99				
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%			68,25	68,25				
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%			88,70	88,70				
2	**Pendidikan Dasar**	**Orang**	531.679	531.679			128.782.776.967		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD									
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,59	98,59				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			63,91	63,91				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			56,55	56,55				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			76,42	76,42				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			68,09	68,09				
f	Indeks iklim Inklusivitas	%			62,45	62,45				
	SMP									
a	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,59	98,59				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			73,97	73,97				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			66,36	66,36				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			72,29	72,29				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			67,41	67,41				
f	Indeks Iklim Inkusivitas	%			62,17	62,17				
3	**Pendidikan Kesetaraan**	**Orang**	25.978	25.978			242.800.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-8 Tahun Keatas *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			18,96	18,96				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Orang**	83.406	83.406			28.191.293.419		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			88,13	88,13				
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%			71,58	71,58				
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%			91,80	91,80				
2	**Pendidikan Dasar**	**Orang**	530.545	530.545			142.894.329.623		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD									
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,61	98,61				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			66,16	66,16				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			58,8	58,8				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			77,62	77,62				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			69,09	69,09				
f	Indeks iklim Inklusivitas	%			63,95	63,95				
	SMP									
a	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,61	98,61				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			74,47	74,47				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			67,36	67,36				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			73,49	73,49				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			68,41	68,41				
f	Indeks Iklim Inkusivitas	%			63,67	63,67				
3	**Pendidikan Kesetaraan**	**Orang**	26.585	26.585			267.080.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-8 Tahun Keatas *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			20,49	20,49				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Orang**	86.387	86.387			28.807.746.64		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			89,17	89,17				
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%			74,83	74,83				
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%			94,56	94,56				
2	**Pendidikan Dasar**	**Orang**	527.704	527.704			143.072.209.929		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD									
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,62	98,62				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			68,41	68,41				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			61,05	61,05				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			78,82	78,82				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			70,09	70,09				
f	Indeks iklim Inklusivitas	%			65,45	65,45				
	SMP									
a	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,62	98,62				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			74,97	74,97				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			68,36	68,36				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			74,69	74,69				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			69,41	69,41				
f	Indeks Iklim Inkusivitas	%			65,17	65,17				
3	**Pendidikan Kesetaraan**	**Orang**	27.192	27.192			269.508.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-8 Tahun Keatas *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			22,12	22,12				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2030)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Orang**	89.331	89.331			31.072.068.083		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			90,14	90,14				
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%			78,00	78,00				
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%			96,92	96,92				
2	**Pendidikan Dasar**	**Orang**	524.862	524.862			157.201.550.616		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD									
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,64	98,64				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			70,66	70,66				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			63,3	63,3				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			80,02	80,02				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			71,09	71,09				
f	Indeks iklim Inklusivitas	%			66,95	66,95				
	SMP									
a	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			98,64	98,64				
b	Kemampuan Literasi	Nilai			75,47	75,47				
c	Kemampuan Numerasi	Nilai			69,36	69,36				
d	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			75,89	75,89				
e	Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai			70,41	70,41				
f	Indeks Iklim Inkusivitas	%			66,67	66,67				
3	**Pendidikan Kesetaraan**	**Orang**	27.799	27.799			294.030.800		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah 7-8 Tahun Keatas *Tidak masuk kedalam perhitungan	%			23,84	23,84				

3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	25.232	25.568	25.568			155.742.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	25.232			25.568	25.568				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet	2.270.880			2.301.120	2.301.120				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	25.232			25.232	25.232				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket	62			62	62				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	62			62	62				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	62			62	62				
g	Alat deteksi risiko ibu hamil: skirning triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sifilis dan HIV	Paket	62			62	62				
h	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	25.232			25.568	25.568				
i	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku	25.232			25.568	25.568				
j	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	62			62	62				
k	GEl USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	1.682			1.682	1.682				
l	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	315			315	315				
m	Tenaga kesehatan: Bidan	orang	876			876	876				
n	Tenaga Kesehatan: Perawat	orang	1.143			1.143	1.143				
o	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	orang	276			276	276				
p	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	orang	107			107	107				
q	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	orang	25.232			25.568	25.568				

2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	25.232	25.434	25.434			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir	25.232			25.434	25.434				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket	25.232			25.434	25.434				
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	25.232			25.434	25.434				
d	media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	62			62	62				
e	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	315			315	315				
f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
h	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	276			276	276				
i	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	24.107	24.300	24.300			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	24.107			24.300	24.300				
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	24.107			24.300	24.300				
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	24.107			24.300	24.300				
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	24.107			24.300	24.300				
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir	24.107			24.300	24.300				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	24.107			24.300	24.300				
g	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	62			62	62				
h	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	314			314	314				
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
k	Tenaga Kesehatan:Tenaga Kefarmasian	Orang	276			276	276				
l	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	136			136	136				
m	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
n	Kader Kesehatan	Orang	12.585			12.585	12.585				
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Orang**	118.113	119.059	119.059			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen	118.113			119.059	119.059				

b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	118.113			119.059	119.059				
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	118.113			119.059	119.059				
d	Vitamin A Biru	Kapsul	9.150			9.150	9.150				
e	Vitamin A Merah	Kapsul	73.247			73.247	73.247				
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin	67.114			67.114	67.114				
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	26.846			26.846	26.846				
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin	103.390			103.390	103.390				
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	51.695			51.695	51.695				
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	77.543			77.543	77.543				
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak-Rubella	Vaksin	25.848			25.848	25.848				
l	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	25.576			25.576	25.576				
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin	25.576			25.576	25.576				
n	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	138.136			138.136	138.136				
o	Peralatan Anafilaktik	Paket	178			178	178				
p	Formula terapi gizi buruk	Paket	60			60	60				
q	Tenaga Medis : Dokter	Orang	304			304	304				
r	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
s	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
t	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
u	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	12.585			12.585	12.585				
v	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang	3.976			3.976	3.976				
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	226.284	228.098	228.098			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku	226.284			228.098	228.098				
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	226.284			228.098	228.098				
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	226.284			228.098	228.098				
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen	2.621			2.621	2.621				
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir	62			62	62				
f	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan	Tablet	3.308.307			3.421.470	3.421.470				

	stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)										
g	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	62			62	62				
h	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	25.550			25.550	25.550				
i	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	62			62	62				
j	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	226.284			228.098	228.098				
k	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang	400			400	400				
l	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
m	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
n	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
o	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	276			276	276				
p	Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	136			136	136				
q	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3.976			3.976	3.976				
r	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	40.958			40.958	40.958				
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	**Orang**	1.007.541	1.015.617	1.015.617			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	124			124	124				
b	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	432			432	432				
c	Alat : Tensimeter	Unit	1.400			1.400	1.400				
d	Alat : Glukometer	Unit	1.400			1.400	1.400				
e	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	62			62	62				
f	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	1.007.541			1.015.617	1.015.617				
g	Alat : KIT IVA Tes	Unit	62			62	62				
h	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	1.007.541			1.015.617	1.015.617				
i	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	62			62	62				

j	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	62			62	62				
k	Alat Pelayanan KB	Unit									
	1. Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim	Unit	62			62	62				
	2. set pemasangan dan pencabutan implan	unit	62			62	62				
	3. vasektomi set	Unit	62			62	62				
l	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	62			62	62				
m	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	1.007.541			1.015.617	1.015.617				
n	Tenaga medis : Dokter	Orang	304			304	304				
o	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
q	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	136			136	136				
s	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2.800			2.800	2.800				
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**Orang**	159.014	160.289	160.289			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	62			62	62				
b	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	62			62	62				
c	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	62			62	62				
d	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	159.014			160.289	160.289				
e	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	159.014			160.289	160.289				
f	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	159.014			160.289	160.289				
g	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	62			62	62				
h	Tenaga medis : Dokter	Orang	304			304	304				
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				

k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	136			136	136				
m	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang	124			124	124				
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**Orang**	112.266	115.275	115.275			115.466.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	paket	124			124	124				
b	Obat Hipertensi	Paket	112.226			115.275	115.275				
c	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	62			62	62				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	112.226			115.275	115.275				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	paket	62			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang	304			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	63			63	63				
k	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	276			276	276				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	136			136	136				
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	24.948	25.617	25.617			124.171.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Obat Diabetes Melitus	Paket	24.948			25.617	25.617				
b	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	62			62	62				
c	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	24.948			25.617	25.617				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak	Formulir	24.948			25.617	25.617				

	Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)										
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE	Pedoman	62			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang	304			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	876			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	276			276	276				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	136			136	136				
k	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	107			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	76			76	76				
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**Orang**	2.148	2.165	2.165			168.805.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku	62			62	62				
b	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	62			62	62				
c	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Orang	62			62	62				
d	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Media	62			62	62				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang	62			62	62				
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	304			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	62			62	62				
h	Tenaga profesional lainnya	Orang	1			1	1				

i	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	3			3	3				
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	27.398	26.416	26.416			221.950.000			
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	73			73	73				
b	Reagen Zn Tb	Kit	73			73	73				
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket	27.398			26.416	26.416				
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	27.398			26.416	26.416				
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Tes	27.398			26.416	26.416				
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	73			73	73				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen	73			73	73				
h	Tuberkulin	Vial	823			823	823				
i	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	185			185	185				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1.143			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	276			276	276				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	136			136	136				
m	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	76			76	76				
n	Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang	42			42	42				
o	Kader Kesehatan	Orang	62			62	62				
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**Orang**	30.980	32.166	32.166			190.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	72			72	72				
b	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	30.980			32.166	32.166				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	30.980			32.166	32.166				

d	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	30.980			32.166	32.166				
e	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	76			76	76				
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	616			876	876				
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	343			343	343				
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	76			76	76				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	118			118	118				
j	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	76			76	76				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	25.758	25.758			65.176.175		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			25.758	25.758				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet			2.318.220	2.318.220				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			25.758	25.758				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			62	62				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			62	62				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			62	62				
g	Alat deteksi risiko ibu hamil: skirning triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sifilis dan HIV	Paket			62	62				
h	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			25.758	25.758				
i	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			25.758	25.758				
j	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
k	GEl USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol			1.682	1.682				
l	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang			315	315				
m	Tenaga kesehatan: Bidan	orang			876	876				
n	Tenaga Kesehatan: Perawat	orang			1.143	1.143				
o	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	orang			276	276				
p	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	orang			107	107				
q	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	orang			25.758	25.758				
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	25.623	25.623			33.726.900		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir			25.623	25.623				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			25.623	25.623				
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			25.623	25.623				
d	media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
e	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			315	315				

f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
h	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			276	276				
i	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	24.481	24.481			41.861.050		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			24.481	24.481				
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			24.481	24.481				
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang			24.481	24.481				
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			24.481	24.481				
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			24.481	24.481				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			24.481	24.481				
g	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			314	314				
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga Kesehatan:Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			136	136				
m	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
n	Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Orang**	119.944	119.944			87.652.100		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			119.944	119.944				
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			119.944	119.944				
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			119.944	119.944				
d	Vitamin A Biru	Kapsul			9.150	9.150				
e	Vitamin A Merah	Kapsul			73.247	73.247				
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			67.114	67.114				
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			26.846	26.846				
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin			103.390	103.390				
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			51.695	51.695				
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			77.543	77.543				
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak-Rubella	Vaksin			25.848	25.848				
l	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			25.576	25.576				
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin			25.576	25.576				

n	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			138.136	138.136				
o	Peralatan Anafilaktik	Paket			178	178				
p	Formula terapi gizi buruk	Paket			60	60				
q	Tenaga Medis : Dokter	Orang			304	304				
r	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
s	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
t	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
u	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
v	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			3.976	3.976				
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	229.792	229.792			116.732.150		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			229.792	229.792				
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			229.792	229.792				
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			229.792	229.792				
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			2.621	2.621				
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			62	62				
f	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet			3.446.880	3.446.880				
g	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat			62	62				
h	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip			25.550	25.550				
i	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			62	62				
j	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			229.792	229.792				
k	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang			400	400				
l	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
m	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
n	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
o	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				

p	Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
q	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			3.976	3.976				
r	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang			40.958	40.958				
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	**Orang**	1.023.161	1.023.161			64.152.600		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			124	124				
b	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			432	432				
c	Alat : Tensimeter	Unit			1.400	1.400				
d	Alat : Glukometer	Unit			1.400	1.400				
e	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit			62	62				
f	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			1.023.161	1.023.161				
g	Alat : KIT IVA Tes	Unit			62	62				
h	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			1.023.161	1.023.161				
i	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit			62	62				
j	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			62	62				
k	Alat Pelayanan KB	Unit								
	1. Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim	Unit			62	62				
	2. set pemasangan dan pencabutan implan	unit			62	62				
	3. vasektomi set	Unit			62	62				
l	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			62	62				
m	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul			1.023.161	1.023.161				
n	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
o	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
q	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
s	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			2.800	2.800				
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**Orang**	161.479	161.479			80.242.675		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN

a	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			62	62				
b	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			62	62				
c	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			62	62				
d	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			161.479	161.479				
e	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			161.479	161.479				
f	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			161.479	161.479				
g	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang			124	124				
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**Orang**	116.645	116.645			75.648.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	paket			124	124				
b	Obat Hipertensi	Paket			116.645	116.645				
c	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			62	62				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen			116.645	116.645				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	paket			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			63	63				
k	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang			276	276				

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	25.921	25.921			74.660.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Obat Diabetes Melitus	Paket			25.921	25.921				
b	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			62	62				
c	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			25.921	25.921				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir			25.921	25.921				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE	Pedoman			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
k	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**Orang**	2.181	2.181			61.676.350		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			62	62				
b	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			62	62				
c	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Orang			62	62				
d	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Media			62	62				

e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang			62	62				
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			62	62				
h	Tenaga profesional lainnya	Orang			1	1				
i	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang			3	3				
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	25.258	25.258			124.349.600		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			73	73				
b	Reagen Zn Tb	Kit			73	73				
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			25.258	25.258				
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket			25.258	25.258				
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Tes			25.258	25.258				
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			73	73				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			73	73				
h	Tuberkulin	Vial			823	823				
i	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			185	185				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
n	Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang			42	42				
o	Kader Kesehatan	Orang			62	62				
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**Orang**	33.483	33.483			62.040.600		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			72	72				
b	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			33.483	33.483				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			33.483	33.483				

d	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			33.483	33.483				
e	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			76	76				
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			343	343				
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			76	76				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			118	118				
j	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			76	76				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	25.942	*25.942*			155.742.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			25.942	25.942				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet			2.334.780	2.334.780				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			25.942	25.942				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			62	62				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			62	62				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			62	62				
g	Alat deteksi risiko ibu hamil: skirning triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sifilis dan HIV	Paket			62	62				
h	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			25.942	25.942				
i	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			25.942	25.942				
j	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
k	GEl USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol			1.682	1.682				
l	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang			315	315				
m	Tenaga kesehatan: Bidan	orang			876	876				
n	Tenaga Kesehatan: Perawat	orang			1.143	1.143				
o	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	orang			276	276				
p	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	orang			107	107				
q	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	orang			25.942	25.942				
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	25.807	25.807			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir			25.807	25.807				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			25.807	25.807				
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			25.807	25.807				
d	media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
e	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			315	315				

f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
h	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			276	276				
i	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	24.656	24.656			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			24.656	24.656				
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			24.656	24.656				
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang			24.656	24.656				
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			24.656	24.656				
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			24.656	24.656				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			24.656	24.656				
g	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			314	314				
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga Kesehatan:Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			136	136				
m	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
n	Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Orang**	120.802	120.802			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			120.802	120.802				
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			120.802	120.802				
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			120.802	120.802				
d	Vitamin A Biru	Kapsul			9.150	9.150				
e	Vitamin A Merah	Kapsul			73.247	73.247				
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			67.114	67.114				
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			26.846	26.846				
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin			103.390	103.390				
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			51.695	51.695				
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			77.543	77.543				
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak-Rubella	Vaksin			25.848	25.848				
l	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			25.576	25.576				
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin			25.576	25.576				

n	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			138.136	138.136				
o	Peralatan Anafilaktik	Paket			178	178				
p	Formula terapi gizi buruk	Paket			60	60				
q	Tenaga Medis : Dokter	Orang			304	304				
r	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
s	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
t	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
u	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
v	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			3.976	3.976				
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	231.437	231.437			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			231.437	231.437				
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			231.437	231.437				
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			231.437	231.437				
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			2.621	2.621				
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			62	62				
f	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet			3.471.555	3.471.555				
g	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat			62	62				
h	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip			25.550	25.550				
i	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			62	62				
j	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			231.437	231.437				
k	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang			400	400				
l	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
m	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
n	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
o	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				

p	Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
q	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			3.976	3.976				
r	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang			40.958	40.958				
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	**Orang**	1.030.484	1.030.484			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			124	124				
b	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			432	432				
c	Alat : Tensimeter	Unit			1.400	1.400				
d	Alat : Glukometer	Unit			1.400	1.400				
e	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit			62	62				
f	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			1.030.484	1.030.484				
g	Alat : KIT IVA Tes	Unit			62	62				
h	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			1.030.484	1.030.484				
i	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit			62	62				
j	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			62	62				
k	Alat Pelayanan KB	Unit								
	1. Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim	Unit			62	62				
	2. set pemasangan dan pencabutan implan	unit			62	62				
	3. vasektomi set	Unit			62	62				
l	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			62	62				
m	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul			1.030.484	1.030.484				
n	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
o	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
q	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
s	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			2.800	2.800				
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**Orang**	162.635	162.635			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN

a	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			62	62				
b	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			62	62				
c	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			62	62				
d	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			162.635	162.635				
e	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			162.635	162.635				
f	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			162.635	162.635				
g	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang			124	124				
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**Orang**	117.943	117.943			115.466.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	paket			124	124				
b	Obat Hipertensi	Paket			117.943	117.943				
c	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			62	62				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen			117.943	117.943				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	paket			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			63	63				
k	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang			276	276				

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	26.210	26.210			124.171.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Obat Diabetes Melitus	Paket			26.210	26.210				
b	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			62	62				
c	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			26.210	26.210				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir			26.210	26.210				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE	Pedoman			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
k	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**Orang**	2.197	2.197			168.805.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			62	62				
b	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			62	62				
c	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Orang			62	62				
d	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Media			62	62				

e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang			62	62				
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			62	62				
h	Tenaga profesional lainnya	Orang			1	1				
i	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang			3	3				
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	22.338	22.338			221.950.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			73	73				
b	Reagen Zn Tb	Kit			73	73				
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			22.338	22.338				
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket			22.338	22.338				
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Tes			22.338	22.338				
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			73	73				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			73	73				
h	Tuberkulin	Vial			823	823				
i	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			185	185				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
n	Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang			42	42				
o	Kader Kesehatan	Orang			62	62				
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**Orang**	33.249	33.249			190.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			72	72				
b	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			33.249	33.249				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			33.249	33.249				

d	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			33.249	33.249				
e	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			76	76				
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			343	343				
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			76	76				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			118	118				
j	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			76	76				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	26.121	26.121			155.742.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			26.121	26.121				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet			2.350.890	2.350.890				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			25.942	25.942				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			62	62				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			62	62				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			62	62				
g	Alat deteksi risiko ibu hamil: skirning triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sifilis dan HIV	Paket			62	62				
h	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			26.121	26.121				
i	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			26.121	26.121				
j	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
k	GEl USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol			1.682	1.682				
l	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang			315	315				
m	Tenaga kesehatan: Bidan	orang			876	876				
n	Tenaga Kesehatan: Perawat	orang			1.143	1.143				
o	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	orang			276	276				
p	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	orang			107	107				
q	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	orang			26.121	26.121				
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	25.984	25.984			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir			25.984	25.984				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			25.984	25.984				
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			25.984	25.984				
d	media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
e	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			315	315				

f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
h	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			276	276				
i	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	24.826	24.826			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			24.826	24.826				
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			24.826	24.826				
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang			24.826	24.826				
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			24.826	24.826				
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			24.826	24.826				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			24.826	24.826				
g	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			314	314				
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga Kesehatan:Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			136	136				
m	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
n	Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Orang**	121.633	121.633			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			121.633	121.633				
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			121.633	121.633				
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			121.633	121.633				
d	Vitamin A Biru	Kapsul			9.150	9.150				
e	Vitamin A Merah	Kapsul			73.247	73.247				
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			67.114	67.114				
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			26.846	26.846				
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin			103.390	103.390				
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			51.695	51.695				
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			77.543	77.543				
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak-Rubella	Vaksin			25.848	25.848				
l	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			25.576	25.576				
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin			25.576	25.576				

n	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			138.136	138.136				
o	Peralatan Anafilaktik	Paket			178	178				
p	Formula terapi gizi buruk	Paket			60	60				
q	Tenaga Medis : Dokter	Orang			304	304				
r	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
s	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
t	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
u	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
v	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			3.976	3.976				
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	233.028	233.028			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			233.028	233.028				
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			233.028	233.028				
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			233.028	233.028				
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			2.621	2.621				
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			62	62				
f	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet			3.495.420	3.495.420				
g	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat			62	62				
h	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip			25.550	25.550				
i	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			62	62				
j	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			233.028	233.028				
k	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang			400	400				
l	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
m	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
n	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
o	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				

p	Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
q	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			3.976	3.976				
r	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang			40.958	40.958				
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	**Orang**	1.037.570	1.037.570			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			124	124				
b	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			432	432				
c	Alat : Tensimeter	Unit			1.400	1.400				
d	Alat : Glukometer	Unit			1.400	1.400				
e	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit			62	62				
f	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			1.037.570	1.037.570				
g	Alat : KIT IVA Tes	Unit			62	62				
h	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			1.037.570	1.037.570				
i	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit			62	62				
j	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			62	62				
k	Alat Pelayanan KB	Unit								
	1. Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim	Unit			62	62				
	2. set pemasangan dan pencabutan implan	unit			62	62				
	3. vasektomi set	Unit			62	62				
l	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			62	62				
m	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul			1.037.570	1.037.570				
n	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
o	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
q	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
s	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			2.800	2.800				
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**Orang**	163.754	163.754			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN

a	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			62	62				
b	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			62	62				
c	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			62	62				
d	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			163.754	163.754				
e	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			163.754	163.754				
f	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			163.754	163.754				
g	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang			124	124				
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**Orang**	119.188	119.188			115.466.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	paket			124	124				
b	Obat Hipertensi	Paket			119.188	119.188				
c	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			62	62				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen			119.188	119.188				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	paket			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			63	63				
k	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang			276	276				

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	26.486	26.486			124.171.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Obat Diabetes Melitus	Paket			26.486	26.486				
b	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			62	62				
c	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			26.486	26.486				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir			26.486	26.486				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE	Pedoman			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
k	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**Orang**	2.212	2.212			168.805.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			62	62				
b	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			62	62				
c	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Orang			62	62				
d	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Media			62	62				

e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang			62	62				
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			62	62				
h	Tenaga profesional lainnya	Orang			1	1				
i	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang			3	3				
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	20.115	20.115			221.950.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			73	73				
b	Reagen Zn Tb	Kit			73	73				
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			20.115	20.115				
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket			20.115	20.115				
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Tes			20.115	20.115				
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			73	73				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			73	73				
h	Tuberkulin	Vial			823	823				
i	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			185	185				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
n	Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang			42	42				
o	Kader Kesehatan	Orang			62	62				
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**Orang**	34.809	34.809			190.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			72	72				
b	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			34.809	34.809				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			34.809	34.809				

d	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			34.809	34.809				
e	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			76	76				
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			343	343				
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			76	76				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			118	118				
j	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			76	76				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2030)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	26.293	*26.293*			155.742.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			26.293	26.293				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet			2.366.370	2.366.370				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			25.942	25.942				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			62	62				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			62	62				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			62	62				
g	Alat deteksi risiko ibu hamil: skirning triple eliminasi dengan tes cepat hepatitis B dan sifilis dan HIV	Paket			62	62				
h	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			26.293	26.293				
i	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			26.293	26.293				
j	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
k	GEl USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol			1.682	1.682				
l	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang			315	315				
m	Tenaga kesehatan: Bidan	orang			876	876				
n	Tenaga Kesehatan: Perawat	orang			1.143	1.143				
o	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	orang			276	276				
p	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	orang			107	107				
q	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	orang			26.293	26.293				
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	26.155	26.155			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir			26.155	26.155				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			26.155	26.155				
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			26.155	26.155				
d	media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
e	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			315	315				

f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
h	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			276	276				
i	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	24.989	24.989			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			24.989	24.989				
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			24.989	24.989				
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang			24.989	24.989				
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			24.989	24.989				
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			24.989	24.989				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			24.989	24.989				
g	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			314	314				
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga Kesehatan:Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			136	136				
m	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			107	107				
n	Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Orang**	122.435	122.435			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			122.435	122.435				
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			122.435	122.435				
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			122.435	122.435				
d	Vitamin A Biru	Kapsul			9.150	9.150				
e	Vitamin A Merah	Kapsul			73.247	73.247				
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			67.114	67.114				
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			26.846	26.846				
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin			103.390	103.390				
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			51.695	51.695				
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			77.543	77.543				
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak-Rubella	Vaksin			25.848	25.848				
l	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			25.576	25.576				
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin			25.576	25.576				

n	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			138.136	138.136				
o	Peralatan Anafilaktik	Paket			178	178				
p	Formula terapi gizi buruk	Paket			60	60				
q	Tenaga Medis : Dokter	Orang			304	304				
r	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
s	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
t	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
u	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			12.585	12.585				
v	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			3.976	3.976				
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	234.564	234.564			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			234.564	234.564				
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			234.564	234.564				
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			234.564	234.564				
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			2.621	2.621				
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			62	62				
f	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet			3.518.460	3.518.460				
g	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat			62	62				
h	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip			25.550	25.550				
i	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			62	62				
j	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			234.564	234.564				
k	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang			400	400				
l	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
m	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
n	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
o	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				

p	Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
q	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			3.976	3.976				
r	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang			40.958	40.958				
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	**Orang**	1.044.409	1.044.409			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			124	124				
b	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			432	432				
c	Alat : Tensimeter	Unit			1.400	1.400				
d	Alat : Glukometer	Unit			1.400	1.400				
e	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit			62	62				
f	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			1.044.409	1.044.409				
g	Alat : KIT IVA Tes	Unit			62	62				
h	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			1.044.409	1.044.409				
i	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit			62	62				
j	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			62	62				
k	Alat Pelayanan KB	Unit								
	1. Set pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim	Unit			62	62				
	2. set pemasangan dan pencabutan implan	unit			62	62				
	3. vasektomi set	Unit			62	62				
l	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			62	62				
m	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul			1.044.409	1.044.409				
n	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
o	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
q	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
s	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			2.800	2.800				
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**Orang**	164.833	164.833			150.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN

a	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			62	62				
b	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			62	62				
c	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			62	62				
d	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			164.833	164.833				
e	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			164.833	164.833				
f	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			164.833	164.833				
g	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			62	62				
h	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
i	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
j	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	orang			124	124				
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**Orang**	120.396	120.396			115.466.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	paket			124	124				
b	Obat Hipertensi	Paket			120.396	120.396				
c	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			62	62				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen			120.396	120.396				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	paket			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			63	63				
k	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang			276	276				

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	26.755	26.755			124.171.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Obat Diabetes Melitus	Paket			26.755	26.755				
b	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			62	62				
c	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			26.755	26.755				
d	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir			26.755	26.755				
e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE	Pedoman			62	62				
f	Tenaga medis : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
j	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
k	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			107	107				
l	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	**Orang**	2.227	2.227			168.805.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			62	62				
b	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			62	62				
c	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Orang			62	62				
d	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Media			62	62				

e	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang			62	62				
f	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			304	304				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			62	62				
h	Tenaga profesional lainnya	Orang			1	1				
i	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang			3	3				
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	18.399	18.399			221.950.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			73	73				
b	Reagen Zn Tb	Kit			73	73				
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			18.399	18.399				
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket			18.399	18.399				
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Tes			18.399	18.399				
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			73	73				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			73	73				
h	Tuberkulin	Vial			823	823				
i	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			185	185				
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.143	1.143				
k	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			276	276				
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			136	136				
m	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			76	76				
n	Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang			42	42				
o	Kader Kesehatan	Orang			62	62				
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**Orang**	35.131	35.131			190.000.000		APBD & APBN	DINAS KESEHATAN
a	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			72	72				
b	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			35.131	35.131				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			35.131	35.131				

d	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			35.131	35.131				
e	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			76	76				
f	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			876	876				
g	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			343	343				
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			76	76				
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			118	118				
j	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			76	76				

3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	7.372	1.600	1.600			4.586.666.666,67		APBD	DPUTR
	Jaringan Perpipaan										
	Kuantitas SPAM										
a	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	450			160	160				
	Kualitas SPAM										
b	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	453			168	168				
	Bukan Jaringan Perpipaan										
	Kuantitas SPAM										
c	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	470			25	25				
	Kualitas SPAM										
d	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	470			25	25				

2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Orang**	5.440	2.932	2.932			8.065.200.000		APBD	DPUTR
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.360			330	330				
b	ukuran kualitas penyediaan peayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung keSPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	520								
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	90			90	90				
d	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	750			240	240				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	1.600	1.600			4.586.666.666,67		APBD	DPUTR
	Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
a	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			175	175				
	Kualitas SPAM									
b	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			175	175				
	Bukan Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
c	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			25	25				
	Kualitas SPAM									
d	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			25	25				
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Orang**	3.800	3.800			10.298.400.000		APBD	DPUTR
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			440	440				

b	ukuran kualitas penyediaan peayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung keSPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga			100	100				
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga			90	90				
d	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			250	250				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	1.600	1.600			4.586.666.666,67		APBD	DPUTR
	Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
a	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			175	175				
	Kualitas SPAM									
b	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			175	175				
	Bukan Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
c	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			25	25				
	Kualitas SPAM									
d	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			25	25				
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Orang**	3.800	3.800			10.298.400.000		APBD	DPUTR
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			440	440				
b	ukuran kualitas penyediaan peayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana	Rumah Tangga			100	100				

	bangunan dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung keSPALD-T Kabupaten/Kota									
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga			90	90				
d	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			250	250				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	1.600	1.600			4.586.666.666,67		APBD	DPUTR
	Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
a	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			175	175				
	Kualitas SPAM									
b	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			175	175				
	Bukan Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
c	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			25	25				
	Kualitas SPAM									
d	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			25	25				
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Orang**	3.800	3.800			10.298.400.000		APBD	DPUTR
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			440	440				
b	ukuran kualitas penyediaan peayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana	Rumah Tangga			100	100				

	bangunan dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung keSPALD-T Kabupaten/Kota									
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga			90	90				
d	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			250	250				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2030)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	1.600	1.600			4.586.666.666,67		APBD	DPUTR
	Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
a	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			175	175				
	Kualitas SPAM									
b	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			175	175				
	Bukan Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
c	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga			25	25				
	Kualitas SPAM									
d	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga			25	25				
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**Orang**	3.800	3.800			10.298.400.000		APBD	DPUTR
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			440	440				
b	ukuran kualitas penyediaan peayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana	Rumah Tangga			100	100				

	bangunan dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung keSPALD-T Kabupaten/Kota									
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga			90	90				
d	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			250	250				

3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	87	84	84			1.365.000.000		APBD	DISPERKIMTAN
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	12								
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	9			21	21				
c	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah									
d	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah									
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										
a	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah									
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah									
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah									

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	84	84			1.365.000.000		APBD	DISPERKIMTAN
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah								
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			21	21				
c	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah								
d	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah								
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
a	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah								
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah								
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah								

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	84	84			1.365.000.000		APBD	DISPERKIMTAN
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah								
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			21	21				
c	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah								
d	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah								
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
a	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah								
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah								
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah								

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	84	84			1.365.000.000		APBD	DISPERKIMTAN
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah								
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			21	21				
c	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah								
d	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah								
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
a	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah								
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah								
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah								

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2030)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	84	84			1.365.000.000		APBD	DISPERKIMTAN
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah								
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			21	21				
c	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah								
d	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah								
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
a	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah								
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah								
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah								

3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	**Orang**	1.800	1.200	1.200			1.495.000.000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	228			228	228	200.000.000			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	20			20	20	75.000.000			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	300			320	320	1.150.000.000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	4			4	4	50.000.000			

e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2			2	2	15.000.000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	2			2	2	5.000.000			
2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	500.000	24.771	24.771			355.000.000		APBD	BPBD
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)										
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)										
	1.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025										
	1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen	2			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen	3			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7			7	7				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7			7	7				
	Tidak Ada										
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									APBD	BPBD
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	1. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	50			50	50				
	2. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	8			8	8				

	3. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5			5	5				
	4. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7			7	7				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										
	1. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3			3	3				
	2. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8			8	8				
	3. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2			2	2				
	4. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2			2	2				
	5. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2			2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik										
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8			8	8				
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8			8	8				
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Orang**	250.000	10.000	10.000			2.092.241.000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)										
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025										
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1			1	1				

	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	2			2	2				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10			10	10				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10			10	10				
	Tidak Ada										
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)										
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2			2	2				
	3. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7			7	7				
	4. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7			7	7				
c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi										
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur										
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	8			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-			-	-				
	4. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3			3	3				
	5. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
	6. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara										
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	-			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	8			8	8				

	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	-			-	-				
	4. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
	5. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3			3	3				
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)										
	1. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1			1	1				
	Gladi Lapang										
	1. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7			7	7				
e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana										
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365			365	365				
	2. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	1			1	1				
	3. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1			1	1				
	4. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1			1	1				
	5. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana										
	1. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3			3	3				

	2. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1			1	1				
	3. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1			1	1				
	4. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1			1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast										
	1. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	2. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat										
	1. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	2. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	2. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	3. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	4. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1			1	1				
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	100.000	1.820	1.820			1.508.500.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	1			1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)		1			1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	3			3	3				

2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1			1	1				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1			1	1				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1			1	1				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1			1	1				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	118								
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	33								
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	250								
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	**Orang**	200	200	200			4.830.029.950		APBD	DISDAMKAR
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	layanan	200			200	200				

	penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)										
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	21			21	21				
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	45			45	45				
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	145			145	145				
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	200			200	200				
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	200			200	200				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	**Orang**	1.250	1.250			1.495.000.000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit			228	228	200.000.000			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			21	21	75.000.000			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			325	325	1.150.000.000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen			5	5	50.000.000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			1	1	15.000.000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang			1	1	5.000.000			

2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	24.771	24.771			355.000.000		APBD	BPBD
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	Tidak Ada									
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana									
	1. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar			50	50				
	2. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			8	8				
	3. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	4. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia									
	1. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	2. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			2	2				
	4. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				

	5. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Orang**	10.000	10.000			2.738.741.000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			2	2				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	Tidak Ada									
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)									
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	4. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi									
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			3	3				
	5. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	6. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)									
	1. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Gladi Lapang									
	1. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana									
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365	365				
	2. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			1	1				
	3. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1	1				
	4. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	5. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	1. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			3	3				
	2. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	3. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	4. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	1. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	1. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				

	4. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	1.820	1.820			2.155.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen			1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)				1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang			3	3				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit			1	1				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen			1	1				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	**Orang**	200	200			3.293.557.000		APBD	DISDAMKAR

a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			200	200				
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			21	21				
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			45	45				
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			145	145				
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			200	200				
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			200	200				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	**Orang**	1.300	1.300			1.495.000.000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit			228	228	200.000.000			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			21	21	75.000.000			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			330	330	1.150.000.000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen			5	5	50.000.000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			1	1	15.000.000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang			1	1	5.000.000			

2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	24.771	24.771			355.000.000		APBD	BPBD
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	Tidak Ada									
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana									
	1. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar			50	50				
	2. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			8	8				
	3. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	4. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia									
	1. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	2. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			2	2				
	4. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				

	5. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Orang**	10.000	10.000			2.738.741.000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			2	2				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	Tidak Ada									
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)									
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	4. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi									
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			3	3				
	5. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	6. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)									
	1. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Gladi Lapang									
	1. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				

e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana									
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365	365				
	2. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			1	1				
	3. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1	1				
	4. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	5. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	1. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			3	3				
	2. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	3. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	4. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	1. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	1. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				

	4. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	1.820	1.820			2.155.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen			1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)				1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang			3	3				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit			1	1				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen			1	1				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	**Orang**	200	200			6.793.557.000		APBD	DISDAMKAR

a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			200	200				
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			21	21				
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			45	45				
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			145	145				
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			200	200				
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			200	200				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	**Orang**	1.350	1.350			1.495.000.000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit			228	228	200.000.000			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			23	23	75.000.000			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			330	330	1.150.000.000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen			5	5	50.000.000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			1	1	15.000.000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang			1	1	5.000.000			

2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	24.771	24.771			355.000.000		APBD	BPBD
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	Tidak Ada									
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana									
	1. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar			50	50				
	2. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			8	8				
	3. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	4. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia									
	1. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	2. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			2	2				
	4. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				

	5. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Orang**	10.000	10.000			2.738.741.000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			2	2				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	Tidak Ada									
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)									
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	4. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi									
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			3	3				
	5. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	6. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)									
	1. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Gladi Lapang									
	1. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana									
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365	365				
	2. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			1	1				
	3. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1	1				
	4. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	5. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	1. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			3	3				
	2. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	3. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	4. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	1. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	1. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				

	4. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	1.820	1.820			2.155.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen			1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)				1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang			3	3				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit			1	1				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen			1	1				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	**Orang**	200	200			6.793.557.000		APBD	DISDAMKAR

a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			200	200				
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			21	21				
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			45	45				
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			145	145				
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			200	200				
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			200	200				

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2030)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	**Orang**	1.400	1.400			1.495.000.000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit			228	228	200.000.000			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			23	23	75.000.000			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			330	330	1.150.000.000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen			5	5	50.000.000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			1	1	15.000.000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang			1	1	5.000.000			

2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	24.771	24.771			355.000.000		APBD	BPBD
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Dokumen			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang			7	7				
	Tidak Ada									
b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana									
	1. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar			50	50				
	2. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			8	8				
	3. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	4. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia									
	1. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	2. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			2	2				
	4. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				

	5. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8	8				
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Orang**	10.000	10.000			2.738.741.000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen			1	1				
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025									
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			2	2				
	4. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	5. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	Tidak Ada									
b	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)									
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2	2				
	3. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				
	4. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

c	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi									
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				-	-				
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			3	3				
	4. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			3	3				
	5. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	6. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	1. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-	-				
	2. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			8	8				
	3. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	4. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	5. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)									
	1. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Gladi Lapang									
	1. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	2. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			7	7				

e	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana									
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365	365				
	2. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			1	1				
	3. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1	1				
	4. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	5. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	1. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			3	3				
	2. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	3. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	4. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	1. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	1. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	1. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	2. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	3. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				

	4. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Orang**	1.820	1.820			2.155.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen			1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)				1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang			3	3				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket								
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen								
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen								
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen								
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen								
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket								
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit								
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen								
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen								
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	**Orang**	200	200			6.793.557.000		APBD	DISDAMKAR

a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			200	200				
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			21	21				
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			45	45				
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			145	145				
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			200	200				
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			200	200				

3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	**Orang**	557	405	405			469.452.438,12		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	orang	40			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	orang	70			10	10	26.148.914,06			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang	30			15	15	26.148.912,06			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang	5			10	10	17.432.607			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	75			51	51	213.860.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang	5			5	5	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani	orang	60			300	300	128.158.148			

	penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)										
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang	97			3	3	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	15			1	1	170.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang	60			2	2	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang	40			3	3	257.500			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang	20			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang	40			3	3	300.000			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	216	330	330			255.592.935,06		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang	15			5	5	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang	orang	20			5	5	26.148.913			

	dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)										
c	Penyediaan Permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)		5			5	5	26.148.912			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang	5			5	5	17.432.607			
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang	5			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang	70			300	300	128.158.646			
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang	51			3	3	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	10			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang	10			1	1	192.500			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang	5			1	1	257.500			

k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang	10			1	1	150.000			
l	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang	10			2	2	300.000			
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	1.095	362	362			260.843.437,59		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana	orang	25			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	orang	30			25	25	52.297.825			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang	464			17	17	3.286.500			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang	305			5	5	1.963.500			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang	2			1	1	17.432.607			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang	5			4	4	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang	orang	174			300	300	128.159.148			

	ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)										
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang	5			2	2	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	15			1	1	170.000			
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang	15			1	1	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang	15			1	1	257.500			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang	15			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang	25			3	3	300.000			
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Orang**	210	329	329			255.592.936,880		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang	20			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang	15			5	5	26.148.914			

c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang	20			5	5	26.148.911			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang	9			5	5	17.432.607			
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang	5			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang	5			300	300	128.158.647,88			
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang	26			2	2	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	25			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang	15			1	1	192.500			
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	orang	40			1	1	257.500			
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat	orang	15			1	1	150.000			

	memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)										
l	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang	15			2	2	300.000			
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	6.510	5.801	5.801			919.263.022		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	orang	5.600			5.600	5.600	854.398.400			
b	Penyediaan Sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang	100			20	20	23.211.626			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	unit	10			32	32	6.985.006			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	orang	300			49	49	13.169.450			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	orang	500			100	100	21.498.540			

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	**Orang**	758	758			771.538.500		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	orang			50	50	278.131			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	orang			3	3	42.892.500			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			233	233	110.560.348			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			25	25	18.750.000			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			76	76	459.375.360			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2	17.892.500			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			258	258	79.417.161			

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			150	150	41.390.000			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	212.500			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			2	2	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			3	3	192.500			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	192.500			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	192.500			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	465	465			258.163.134		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			5	5	278.129			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	orang			3	3	30.392.500			
c	Penyediaan Permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)				30	30	56.560.346			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk	orang			15	15	18.750.000			

	perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)									
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2	30.392.500			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			258	258	79.417.159			
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			150	150	41.390.000			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	212.500			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	192.500			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	192.500			
l	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	192.500			
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	571	571			311.378.134		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana	orang			50	50	278.129			

b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	orang			2	2	24.500.000			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			130	130	109.560.346			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			20	20	18.750.000			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang			2	2	18.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2	18.500.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			257	257	79.417.159			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			150	150	41.390.000			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	212.500			
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	192.500			

l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	192.500			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	192.500			
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Orang**	591	591			311.378.134		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			50	50	278.129			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang			2	2	30.500.000			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			158	158	109.560.346			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			15	15	18.750.000			
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2	30.500.000			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			257	257	79.417.159			

g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			150	150	41.390.000			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			1	1	212.500			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	192.500			
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	192.500			
l	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	192.500			
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	5.600	5.600			1.054.172.091		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	orang			5.600	5.600	781.197.000			
b	Penyediaan Sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			85	85	178.373.191			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	unit			32	32	48.279.900			

d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	orang			100	100	30.980.000			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	orang			100	100	15.342.000			

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	**Orang**	405	405			469.452.438,12		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	orang			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	orang			10	10	26.148.914,06			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			15	15	26.148.912,06			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			10	10	17.432.607			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			51	51	213.860.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.148			

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			3	3	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			2	2	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			3	3	257.500			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	300.000			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	330	330			255.592.935,06		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			5	5	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	orang			5	5	26.148.913			
c	Penyediaan Permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)				5	5	26.148.912,06			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk	orang			5	5	17.432.607			

	perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)									
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.646			
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			3	3	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
l	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	300.000			
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	362	362			260.843.437,59		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana	orang			50	50	170.000			

b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	orang			25	25	52.297.825			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			17	17	3.286.500			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			5	5	1.963.500			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang			1	1	17.432.607			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.159.148,59			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			2	2	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			

l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	300.000			
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Orang**	329	329			255.592.936,880		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang			5	5	26.148.914			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			5	5	26.148.911			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			5	5	17.432.607			
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.647,88			

g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			2	2	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
l	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	300.000			
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	5.801	5.801			919.263.022		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	orang			5.600	5.600	854.398.400			
b	Penyediaan Sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			20	20	23.211.626			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	unit			32	32	6.985.006			

d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	orang			49	49	13.169.450			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	orang			100	100	21.498.540			

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	**Orang**	405	405			469.452.438,12		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	orang			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	orang			10	10	26.148.914,06			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			15	15	26.148.912,06			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			10	10	17.432.607			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			51	51	213.860.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.148			

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			3	3	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			2	2	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			3	3	257.500			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	300.000			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	330	330			255.592.935,06		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			5	5	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	orang			5	5	26.148.913			
c	Penyediaan Permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)				5	5	26.148.912,06			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk	orang			5	5	17.432.607			

	perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)									
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.646			
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			3	3	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
l	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	300.000			
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	362	362			260.843.437,59		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana	orang			50	50	170.000			

b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	orang			25	25	52.297.825			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			17	17	3.286.500			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			5	5	1.963.500			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang			1	1	17.432.607			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.159.148,59			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			2	2	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			

l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	300.000			
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Orang**	329	329			255.592.936,880		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang			5	5	26.148.914			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			5	5	26.148.911			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			5	5	17.432.607			
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.647,88			

g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			2	2	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
l	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	300.000			
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	5.801	5.801			919.263.022		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	orang			5.600	5.600	854.398.400			
b	Penyediaan Sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			20	20	23.211.626			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	unit			32	32	6.985.006			

d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	orang			49	49	13.169.450			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	orang			100	100	21.498.540			

No	Indikator Kinerja/Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2030)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rupiah)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	**Orang**	405	405			469.452.438,12		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	orang			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	orang			10	10	26.148.914			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			15	15	26.148.912			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			10	10	17.432.607			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			51	51	213.860.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.148			

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			3	3	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			2	2	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			3	3	257.500			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	300.000			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	330	330			255.592.935,06		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			5	5	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	orang			5	5	26.148.913			
c	Penyediaan Permakanan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)				5	5	26.148.912,06			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk	orang			5	5	17.432.607			

	perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)									
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.646			
g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			3	3	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
l	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	300.000			
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Orang**	362	362			260.843.437,59		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana	orang			50	50	170.000			

b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	orang			25	25	52.297.825			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			17	17	3.286.500			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			5	5	1.963.500			
e	Penyediaan Alat Bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	orang			1	1	17.432.607			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4	17.432.607			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.159.148,59			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			2	2	39.031.250			
i	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang			1	1	170.000			
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
k	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			

l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
m	Layanan Rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			3	3	300.000			
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Orang**	329	329			255.592.936,880		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	orang			50	50	170.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	orang			5	5	26.148.914			
c	Penyediaan Permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	orang			5	5	26.148.911			
d	Penyediaan Sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	orang			5	5	17.432.607			
e	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5	17.432.607			
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	orang			300	300	128.158.647,88			

g	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	orang			2	2	39.031.250			
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			1	1	170.000			
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	orang			1	1	192.500			
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	orang			1	1	257.500			
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	orang			1	1	150.000			
l	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	orang			2	2	300.000			
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang**	5.801	5.801			919.263.022		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	orang			5.600	5.600	854.398.400			
b	Penyediaan Sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	orang			20	20	23.211.626			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	unit			32	32	6.985.006			

d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	orang			49	49	13.169.450			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	orang			100	100	21.498.540			

3.3 Penyelarasan Target Rencana Aksi dan Perubahan Substansi Indikator

Pelaksanaan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada dasarnya bersifat dinamis dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dapat mengalami perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas pelaksanaan maupun perkembangan kebijakan. Oleh karena itu, penyesuaian target Rencana Aksi SPM merupakan bagian dari upaya untuk menjaga agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap realistis, terukur, serta selaras dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada proses penyusunan rencana aksi dan hasil evaluasi penerapan SPM di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa perubahan yang berhasil diidentifikasi diantaranya besaran jumlah target dan pengoperasian indikator mutu pelayanan dasar. Perubahan jumlah target penerima pelayanan dasar salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan penggunaan metode perhitungan yang telah dimutakhirkan. Sementara itu, perubahan pengoprasian indikator dipengaruhi oleh arahan penggunaan indikator mutu pelayanan dasar oleh beberapa kementrian teknis sebagaimana yang termuat di dalam aplikasi e-SPM : https://spm.bangda.kemendagri.go.id. Adapun penyesuaian jumlah target yang ditetapkan terjadi hampir di seluruh bidang pelayanan dasar, sedangkan pemutakhiran indikator mutu pelayanan dasar terjadi pada pelayanan dasar bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, dan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat khususnya pada sub unsur kebencanaan.

Adanya perubahan target dan penggunaan indikator mutu pelayanan dasar tidak semata-mata mencerminkan penurunan komitmen dalam pemenuhan SPM di Kabupaten Bandung, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi riil pelaksanaan dan perkembangan kebijakan guna mendukung pencapaian target yang lebih akurat, terukur, dan implementatif.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SPM

4.1 Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bandung, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di cross check apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
    a) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
    b) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
    c) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
    d) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
        - Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

- Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
- Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

2. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
   a) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
   b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
   c) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   e) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

3. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

a) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
b) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
c) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

4. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

a) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
b) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
c) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanan nya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
d) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
e) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?

f) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?

g) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

1. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
    a) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
    b) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
    c) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
    a) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
    b) Bagaimana SPM diposisikan?
    c) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
    d) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
    e) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
3. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

a) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
b) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
c) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap bidang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan kinerja yang cukup positif, yang ditandai dengan tercapainya target pada seluruh indikator pelayanan dasar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kinerja penerapan SPM, salah satunya adalah penurunan jumlah penerima pelayanan dasar pada beberapa jenis layanan, khususnya pada tahun 2025. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar untuk periode lima tahun ke depan. Rencana aksi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung, pemenuhan kuantitas dan mutu pelayanan dasar, serta penguatan dukungan pendanaan yang memadai.

Untuk mengoptimalkan penerapan SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu melaksanakan kegiatan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelayanan dasar, meninjau kesesuaian antara target dan capaian, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan SPM. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan kebijakan, serta penguatan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan pelayanan dasar.

5.2 Saran

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, secara rutin untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bandung.
2. Perlunya penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bandung berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Kepmendagri Nomor 900.1– 861

Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bandung secepatnya mengkoordinasikan rencana aksi daerah, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perangkat daerah pengampu SPM perlu melakukan pemetaan berbasis kebutuhan layanan prioritas menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.
5. Tim penerapan SPM perlu berkordinasi secara aktif dalam melaksanakan pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan pelaporan secara online per triwulan melalui Aplikasi e-SPM.
6. Perangkat daerah pengampu SPM perlu meninjau kembali jumlah target penerima pelayanan dasar serta mutu pelayanan dasar sesuai dengan kondisi anggaran saat ini.
7. Mengoptimalkan kegiatan pendukung pelayanan dasar berbasis daring, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM.
8. Diperlukan kebijakan yang menjamin keberlanjutan program/kegiatan pendukung SPM agar tidak terdampak signifikan akibat efisiensi anggaran.
9. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung penerapan SPM melalui kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan 12
Tabel1.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung 14
Tabel1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2025 16
Tabel1.4 Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 17
Tabel1.5 Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 21
Tabel1.6 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori Tahun 2019-2025 22
Tabel1.7 Pendapatan Per-Kapita (ADHB) Kabupaten Bandung 2019-2025..... 23
Tabel1.8 Capaian dan Target Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025..... 25
Tabel1.9 Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 26
Tabel1.10 Capaian dan Target Indeks Gini Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025..... 27
Tabel1.11 Capaian dan Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 29
Tabel1.12 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 31
Tabel1.13 Capaian dan Target Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 32
Tabel1.14 Capaian dan Target Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 33
Tabel1.15 Capaian dan Target Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 33
Tabel1.16 Capaian dan Target Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2023-2025 34

Tabel 2.1 Kondisi Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025..... 36
Tabel 2.2 Kondisi Capaian Bidang Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2025..... 36
Tabel 2.3 Tabel 2.3. Kondisi Capaian Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025 38
Tabel 2.4 Tabel 2.4. Kondisi Capaian Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Tahun 2025 38
Tabel 2.5 Tabel 2.5. Kondisi Capaian Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2025..... 39
Tabel 2.6 Kondisi Capaian Bidang Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025..... 39
Tabel 3.1 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pendidikan 57
Tabel 3.2 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Kesehatan 61
Tabel 3.3 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pekerjaan Umum..... 63
Tabel 3.4 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Perumahan Rakyat..... 68
Tabel 3.5 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 69
Tabel 3.6 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Sosial 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung..... 11
Gambar 1.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung 12
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2025..... 17
Gambar 1.4 Kontribusi Sektor Utama terhadap Perekonomian Kabupaten Bandung 2020-2025..... 18
Gambar 1.5 Kontribusi PDRB Berdasarkan Pengeluaran terhadap Perekonomian 2019-2025..... 19
Gambar 1.6 Proporsi Sektor PDRB ADHB Kabupaten Bandung Tahun 2025..... 20
Gambar 1.7 Grafik PDRB Per-Kapita Kabupaten Bandung..... 24
Gambar 1.8 Perbandingan TPT Daerah dengan Capaian Nasional dan Jawa Barat Tahun 2023-2025 26
Gambar 1.9 Grafik Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2025..... 28
Gambar 1.10 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2019-2024..... 29
Gambar 1.11 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024..... 30
Gambar 1.12 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung 31